

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI  
KINERJA BUMN PADA PT. PLN (PERSERO) TAHUN 2012**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh :  
Galih Retno Aryati  
11409134062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

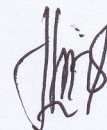
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Galih Retno Aryati  
NIM : 11409134062  
Program Studi : Akuntansi D III  
Judul Tugas Akhir : Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat  
Untuk Menilai Kinerja BUMN pada PT.  
PLN (Persero) Tahun 2012

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 22 Juni 2014

Yang menyatakan,



Galih Retno Aryati



**ANALISI LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI  
KINERJA BUMN PADA PT. PLN (PERSERO) TAHUN 2012**

**TUGAS AKHIR**

Telah disetujui dan disahkan  
Pada tanggal 25 Juni 2014  
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Proram Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Kordinator  
Proram Studi Akuntansi D III

Amanita Novi Yushita, M.Si  
NIP. 19770810 200604 2 002

Dosen Pembimbing

Abdullah Taman, M.Si, Ak  
NIP. 19630624 199001 1 001

Ketua Pengelola  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Wates



Drs. Bambang Saptono, M.Si  
NIP. 19610723 198803 1 001




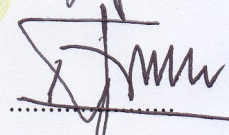
## TUGAS AKHIR

### ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA BUMN PADA PT. PLN (PERSERO) TAHUN 2012

Disusun Oleh :  
Galih Retno Aryati  
11409134062

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi D III  
Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal.....~~5~~ Juli.....2014 dan dinyatakan telah memenuhi  
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya.

#### Susunan Tim Penguji

|                              | Nama Lengkap             | Tanda Tangan  |
|------------------------------|--------------------------|---|
| Ketua merangkap anggota      | Prof. Sukirno, Ph.D      | .....  |
| Sekretaris merangkap anggota | Abdullah Taman, M.Si. Ak | .....  |

Yogyakarta, 10 Juli 2014

Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si  
NIP. 19550328 198303 1 002

Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Wates  
Ketua Pengelola,



Drs. Bambang Saptono, M.Si  
NIP. 19610723 198803 1 001



## **MOTTO**

Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda,  
adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,  
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),  
maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.  
(Qs. Al- Lail: 4-7)

Kasih sayang dan kekerasan selalu berperang di hati manusia seperti malapetaka  
yang berperang di langit malam yang pekat ini, tetapi kasih sayang selalu dapat  
mengalahkan kekerasan, karena ia adalah anugerah Tuhan dan ketakutan-  
ketakutan malam ini akan berlalu dengan datangnya siang.  
(Kahlil Gibran)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orangtua tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan bantuan moril maupun materiil untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Adikku tercinta yang selalu memberikan semangatnya dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang selama ini dengan sabar mendidik saya.
4. Teman-teman Akuntansi D III angkatan 2011.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA BUMN PADA PT. PLN (PERSERO) PADA TAHUN 2012**

Oleh :

Galih Retno Aryati  
11409134062

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio likuiditas, (2) kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio aktivitas, (3) kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio profitabilitas, (4) kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio rentabilitas.

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT. PLN (Persero) yaitu laporan posisi keuangan tahun 2012, laporan laba rugi tahun 2012 dan laporan perubahan ekuitas tahun 2012. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan Keputusan menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Cash Ratio*/Rasio Kas PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang sehat dalam penyediaan dana tunai untuk membiayai operasi perusahaan, (2) *Current Ratio*/Rasio Lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan kondisi kurang sehat karena belum seluruh aktiva lancar dapat menutupi seluruh kewajiban lancarnya, (3) Perputaran Persediaan (PP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan efektivitas operasional perusahaan dalam keadaan yang sehat, (4) *Collection Periods* (CP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam melakukan pencairan piutang usaha mempunyai kemampuan yang sehat, (5) ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan masih kurang sehat dalam menghasilkan laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan, (6) ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang sehat dalam mengelola kegiatannya, (7) Perputaran Total Aset/ *Total Asset Turn Over* (TATO) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam keadaan yang kurang sehat untuk menghasilkan pendapatan dengan didukung oleh aset perusahaan yang tersedia, (8) Rendahnya rasio TMS terhadap TA PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pencapaian modal sendiri terhadap total aktiva dalam keadaan yang kurang sehat guna mengelola kedua komponen tersebut.

Kata Kunci: Laporan Keuangan PT. PLN (Persero), Kep BUMN No: KEP-100/MBU/2002.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala rahmat-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir yang berjudul: “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja BUMN Pada PT. PLN (Persero) tahun 2012”. Dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan penyelesaian studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd, MA, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bambang Saptono, M.Si. Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
4. Amanita Novi Yushita, M.Si. Ketua Program Studi Akuntansi DIII.
5. Abdullah Taman, M.Si. Ak yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan danpengarahan selama penyusunan tugas akhir.
6. Kedua Orangtua serta Adik yang tercinta dan keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta do’a dan restu.

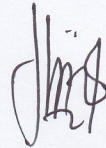


7. Semua pihak yang terkait dan tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan motivasi serta bantuan selama ini.

Didasari betul bahwa tugas akhir ini masih belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu saran dan kritiknya selalu diharapkan demi perbaikan lebih lanjut.

Yogyakarta, 23 Juni 2014

Penyusun



Galih Retno Aryati  
NIM 11409134062

## DAFTAR ISI

|                                | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....             | i       |
| HALAMAN PERNYATAAN.....        | ii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....       | iii     |
| HALAMAN PENGESAHAN.....        | iv      |
| MOTTO.....                     | v       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....       | vi      |
| ABSTRAK.....                   | vii     |
| KATA PENGANTAR.....            | viii    |
| DAFTAR ISI.....                | x       |
| DAFTAR TABEL.....              | xiii    |
| DAFTAR GAMBAR.....             | xiv     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....           | xv      |
| BAB I PENDAHULUAN.....         | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1       |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 6       |
| C. Pembatasan Masalah.....     | 6       |



|   |           |
|---|-----------|
| D. Rumusan Masalah.....   | 7         |
| E. Tujuan Penelitian.....                                       | 7         |
| F. Manfaat Penelitian.....                                      | 8         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>                               | <b>10</b> |
| A. Pengukuran Kinerja.....                                      | 10        |
| B. Penilaian Kesehatan BUMN.....                                | 15        |
| C. Peran Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja.....        | 20        |
| D. Indikator Kinerja dan Pengukuran <i>value of money</i> ..... | 22        |
| E. Pengertian Laporan Keuangan.....                             | 26        |
| F. Analisis Rasio.....  | 29        |
| G. Klasifikasi Rasio.....                                       | 30        |
| H. Rasio Likuiditas.....  | 30        |
| I. Rasio Aktivitas.....   | 31        |
| J. <i>Financial Leverage</i> .....                              | 34        |
| K. Rasio Profitabilitas.....                                    | 36        |
| L. Kerangka Berpikir.....                                       | 38        |
| M. Pertanyaan Penelitian.....                                   | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                           | <b>40</b> |
| A. Subjek dan Objek.....  | 40        |
| B. Jenis Data.....  | 40        |
| C. Metode Pengumpulan Data.....                                 | 40        |
| D. Teknik Analisis Data.....                                    | 40        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Profil Perusahaan.....        | 46 |
| B. Analisis Data.....            | 54 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....  | 68 |
| A. Kesimpulan.....               | 68 |
| B. Saran.....                    | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA.....              | 71 |
| LAMPIRAN.....                    | 72 |



## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| 1. Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit.....               | 19      |
| 2. Daftar skor penilaian ROE.....                                      | 41      |
| 3. Daftar Skor penilaian ROI.....                                      | 41      |
| 4. Daftar skor penilaian <i>cash ratio</i> .....                       | 42      |
| 5. Daftar skor penilaian <i>current ratio</i> .....                    | 42      |
| 6. Daftar skor penilaian <i>Collection Periods</i> .....               | 43      |
| 7. Daftar skor penilaian perputaran persediaan.....                    | 43      |
| 8. Daftar skor penilaian perputaran total asset.....                   | 44      |
| 9. Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset..... | 44      |
| 10. Data Keuangan yang Digunakan untuk Menghitung Rasio Keuangan       | 54      |
| 11. Hasil Perhitungan Aspek Keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012...   | 66      |

## DAFTAR GAMBAR

|                             | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| 1. Kerangka Konseptual..... | 38      |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  | Halaman |
|--|---------|
| 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....       | 73      |
| 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian..... | 75      |
| 3. Laporan Arus Kas Konsolidasian.....               | 76      |
| 4. Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....      | 77      |
| 5. Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.....  | 78      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajerial internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat dianalisis menggunakan beberapa rasio keuangan, dengan adanya analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh perusahaan diwaktu yang lalu maupun diwaktu yang sedang berjalan baik itu badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Laporan keuangan yang telah dianalisis tersebut dapat digunakan sebagai dana pembantu untuk pengambilan keputusan manajerial perusahaan. Menurut Munawir (2001:2)”

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi pada masa ini yang terus meningkat sehingga menyebabkan semakin diperlukannya keahlian dalam menganalisis laporan keuangan. Dengan menganalisa laporan keuangan tersebut akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan keputusan yang akan dibuatnya baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan seluruh posisi keuangan dan kinerja keuangan

perusahaan pada periode tersebut. Laporan keuangan yang disajikan harus menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

BUMN merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awalnya merupakan wadah bisnis dari aset asing yang dinasionalisasikan. Definisi BUMN menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (pasal 1). Sedangkan definisi perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah disaji oleh perusahaan. Menurut Ihyaul (2009:56) "Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi untuk unjuk kerja dari instansi pemerintah". Dalam penganalisaan laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Menurut Munawir (2001:64)

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut



dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard.

Agar dapat mengetahui perkembangan perusahaan maka perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Untuk dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan harus mengadakan analisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Dengan menganalisis laporan keuangan tersebut maka akan mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajerial perusahaan.

Kinerja dari suatu perusahaan dapat diukur dari beberapa aspek seperti aspek keuangan dan aspek non keuangan. Ditinjau dari aspek keuangan kinerja perusahaan dapat diukur melalui penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan memberikan informasi penting bagi perusahaan mengenai posisi keuangan perusahaan. Sedangkan ditinjau dari aspek non keuangan, kinerja perusahaan dapat dinilai dari kualitas kerja para karyawan, tingkat kedisiplinan karyawan, ketepatan pemberian wewenang kerja kepada karyawan serta kesejahteraan para karyawan dan tingkat produktivitas.

Penilaian dari aspek non keuangan jika dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain maka hasilnya akan berbeda. Hal ini terjadi karena hasil dari penilaian yang dilakukan pendapatnya muncul dari penilai tersebut, hal ini akan sulit untuk dilakukan karena akan menghasilkan pendapat yang

mungkin berbeda pada tiap penilai. Sedangkan jika penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan maka hasilnya akan sama.

PT. PLN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pelayanan jasa listrik. Perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya memerlukan dana yang cukup banyak dimana dalam penggunaannya serta pengelolaanya diperlukan pelaporan data yang akurat. Rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan melalui penganalisaan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajerial perusahaan. Analisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan diharapkan oleh manajerial perusahaan dapat membantu untuk pengambilan suatu keputusan bagi internal maupun eksternal perusahaan. Keputusan yang diambil oleh perusahaan diharapkan dapat berguna untuk kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang serta manfaat dari analisis laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan keadaan keuangan serta posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Masalah yang dihadapi oleh PT. PLN saat ini adalah dengan adanya masalah hukum yang menimpa beberapa karyawan PT. PLN yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap turunnya kinerja PT. PLN dalam melayani masyarakat umum. Dengan adanya masalah yang timbul ini kegiatan operasional BUMN menghasilkan kinerja yang menurun. Selain masalah yang menimpa beberapa pegawai PLN, PT. PLN juga memiliki masalah lain seperti kapasitas terpasang tidak memadai untuk kebutuhan yang

ada. Serta penambahan pelanggan baru terus bertambah mengikuti pertumbuhan jumlah hunian/rumah baru, industri dan naiknya kebutuhan dirumah tangga karena tambahan elektronik, namun hal ini tidak sejalan dengan penambahan pembangkit listrik/kapasitasnya. PT. PLN dianggap tidak dipercaya untuk mendapatkan pinjaman komersial, hal ini menandakan adanya penurunan kinerja BUMN akibatnya tarif listrik dibawah biaya pokok produksi. PLN juga memiliki masalah dengan tingkat penunggakan pembayaran para pelanggan PLN sehingga menyebabkan gangguan *cash flow* di PLN yang akan menyebabkan penurunan kinerja BUMN saat ada gangguan mengenai *cash flow* nya.

Selain masalah-masalah tersebut diatas PT. PLN (Persero) sering mengalami kerugian dengan adanya pohon tumbang yang merobohkan tiang-tiang listrik milik PLN, hal ini mengindikasikan kerugian yang diderita oleh PLN. Dengan adanya kerugian tersebut maka akan terjadi penurunan laba maupun rasio keuangan atas laporan keuangan PT. PLN (Persero).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja BUMN pada aspek keuangan perusahaan dalam 1 (satu) periode dengan menggunakan rasio keuangan pada laporan keuangan BUMN PT. PLN (Persero) yaitu pada tahun 2012. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk penelitian ini diberi judul “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) Tahun 2012”.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah hukum yang menimpa sejumlah pegawai PT. PLN yang akan mengganggu kinerja perusahaan dalam melayani listrik untuk masyarakat.
2. Penambahan pelanggan baru terus bertambah namun hal ini tidak sejalan dengan penambahan pembangkit listrik/kapasitasnya.
3. PLN dianggap tidak dipercaya/diragukan untuk mendapatkan pinjaman komersial, hal ini menandakan adanya penurunan kinerja BUMN akibatnya tarif listrik dibawah biaya pokok produksi.
4. Tingkat penunggakan pembayaran para pelanggan PLN sehingga menyebabkan gangguan *cash flow* di PLN yang akan mengakibatkan adanya indikasi penurunan kinerja BUMN.
5. Adanya kerugian PT. PLN yang dikarenakan berbagai masalah yang terjadi sehingga akan menurunkan laba yang akan menunjukkan adanya penurunan rasio PLN.
6. Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sulit untuk dilakukan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012. Namun mengingat cakupan penelitian mengenai kinerja perusahaan pada PT.

PLN (Persero) sangat luas, maka peneliti membatasi masalah mengenai penilaian kinerja perusahaan melalui analisis laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 menggunakan rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja BUMN serta kondisi keuangan PT. PLN (Persero) yang sebenarnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio likuiditas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?
2. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio aktivitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?
3. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio profitabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?
4. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio rentabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio likuiditas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.
2. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio aktivitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.
3. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio profitabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.
4. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio rentabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adanya latar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi semua pihak, manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan dapat digunakan untuk menunjukkan kesesuaian antara teori dengan yang ada dalam kenyataan di lapangan.



b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen.
- b. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak PT. PLN (Persero) diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan kepada pihak perusahaan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengukuran Kinerja**

##### **1. Pengertian Kinerja BUMN**

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk memulai prestasi manajer atau unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang andal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.

Definisi BUMN menurut undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 1).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk mewujudkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja nonfinansial.



## 2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

- a. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik ( *top down* dan *bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

## 3. Manfaat Pengukuran Kinerja

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*rewards & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
  - g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
  - h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
4. Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut :

a. Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut telah dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada :

- 1) varians pendapatan (*revenue variance*);
- 2) varians pengeluaran (*expenditure variance*):
  - a) varians belanja rutin (*recurrent expenditure variance*);
  - b) varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*).

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung

jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah.

b. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*. Dengan *Balanced Scorecard* kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja, tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *Balanced Scorecard* melibatkan empat aspek, yaitu:

- 1) Perspektif finansial (*financial perspective*),
- 2) Perspektif kepuasan pelanggan (*customer perspective*),
- 3) Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*),  
dan
- 4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*) atau sering dinamakan sebagai *key success factor*, *key result factor*, atau *pulse point*. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak

diinginkan maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi;
- 2) Sangat *volatile* dan dapat berubah dengan cepat;
- 3) Perubahannya tidak dapat diprediksi;
- 4) Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera;
- 5) Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (*surrogate*).

#### **B. Penilaian Kesehatan BUMN**

Penilaian tingkat kinerja kesehatan BUMN, sampai saat ini masih mengacu pada pedoman dari keputusan kementerian BUMN dengan nomor KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002 mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN. Tujuannya adalah untuk mengadakan penilaian terhadap tingkat kesehatan BUMN dalam suatu periode tertentu.

Penilaian kinerja keuangan pada suatu perusahaan sangatlah penting, karena dapat dianalisis sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Menurut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, tentang penilaian tingkat kerja Badan Usaha Milik Negara, dengan adanya keputusan menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002. Pembuatan keputusan ini menimbang beberapa hal, antara lain :

1. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja



yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing,

2. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara ,
3. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998,
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-100/MBU/2002, tentang Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan

- a. *Return On Equity (ROE)*, dengan rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100 \%$$

- b. *Return On Investment (ROI)*, dengan rumus :

$$ROI = \frac{EBIT + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

c. Rasio Kas ( *Cash Ratio*), dengan rumus :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilitas}} \times 100\%$$

d. Rasio Lancar ( *Current Ratio*), dengan rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilitas}} \times 100 \%$$

e. *Collection Periods* (CP)

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

f. Perputaran Persediaan (PP)

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

g. Perputaran *Total Asset Turn Over* (TATO)

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

## 2. Aspek Operasional

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- a. Baik sekali (BS) : skor =  $100\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$ ,
- b. Baik (B) : skor =  $80\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$ ,
- c. Cukup (C) : skor =  $50\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$ ,
- d. Kurang (K) : skor =  $20\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$ .

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- b) Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- c) Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- d) Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

### 3. Aspek Administrasi

#### a. Penentuan Penilaian

Tabel 1 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

| <b>Jangka Waktu Laporan Audit Diterima</b>                                     | <b>Skor</b> |
|--|-------------|
| sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup | 3           |
| sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup  | 2           |
| lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup     | 0           |

Penilaian tingkat kinerja keuangan berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tingkat kinerja keuangan perusahaan digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, sesuai dengan BAB II pasal 3, yaitu :

#### 1. Kategori sehat, yang terdiri dari :

- a. AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95,
- b. AA apabila  $80 < TS \leq 95$ ,
- c. A apabila  $65 < TS \leq 80$ .

#### 2. Kategori kurang sehat, yang terdiri dari :

- a. BBB apabila  $50 < TS \leq 65$ ,
- b. BB apabila  $40 < TS \leq 50$ ,
- c. B apabila  $30 < TS \leq 40$ .



3. Kategori tidak sehat, yang terdiri dari :

- a. CCC apabila  $20 < TS \leq 30$ ,
- b. CC apabila  $10 < TS \leq 20$ ,
- c. C apabila  $= 10$ .

### C. Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap akhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa *feedback*, *reward* dan *punishment* kepada manajer pusat pertanggungjawaban.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factor*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*).

#### 1. Faktor Keberhasilan Utama

Adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. *Critical success factor* tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi.

## 2. Indikator Kinerja Kunci

Merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut :

- a. Biaya pelayanan (*cost of service*);
- b. Penggunaan (*utilization*);
- c. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*);
- d. Cakupan pelayanan (*coverage*); dan
- e. Kepuasan (*satisfaction*).

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi.

Indikator penggunaan (*utilization*) pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya berupa volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas.

Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif.

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjangkauan aspirasi masyarakat (*need assessment*) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja.

#### **D. Indikator Kinerja dan Pengukuran *Value For Money***

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang

dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

Istilah “ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja yang tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.

2. Spesifikasi teknis dan standardisasi

Kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja.

4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan).

5. Mekanisme sumber daya manusia

Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personel dan organisasi.

Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain:

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi;
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan;
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial;



- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan;
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja;
- f. Untuk menunjukkan efektivitas;
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran; dan
- h. Untuk mewujudkan wilayah, bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*) organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial (biaya) dengan output nonfinansial, misalnya biaya unit (*unit cost statistics*). *Unit cost statistics* tersebut dapat digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah *unit cost statistics* yang spesifik untuk unit kerja.

Ukuran-ukuran statistik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat pembaca anggaran dan laporan keuangan pemerintah yang bukan ahli di bidang manajemen keuangan publik sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Indikator kinerja yang

berbentuk *unit cost statistics* dapat digunakan untuk membandingkan kinerja unit kerja lain yang sejenis.

Bagi pemerintah, angka-angka statistik tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kinerja, menilai tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja serta untuk mengetahui sebab-sebab inefisiensi dan ketidakefektivan unit kerja yang bersangkutan. *Unit cost statistics* sebagai bentuk indikator kinerja tidak saja berfungsi sebagai benang merah untuk mengukur kinerja, akan tetapi juga mendorong untuk dilakukannya inveatigasi lebih detail atas hasil yang dicapai oleh suatu unit kerja. Indikator kinerja dapat juga digunakan untuk membandingkan kinerja unit kerja tertentu dengan kinerja rata-rata nasional atau regional untuk jenis pelayanan yang sama.

#### **E. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Munawir : 2001)

Menurut Myer dalam bukunya *Financial Statement Analysis* mengatakan bahwa :

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang dibagikan (laba yang ditahan).

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 1998) tujuan laporan keuangan adalah untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- a) aktiva;
- b) kewajiban;
- c) ekuitas;
- d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan serta kerugian; dan
- e) arus kas.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan kinerja yang bersifat historis atas suatu perusahaan pada periode tertentu yang bermanfaat dalam memberikan suatu informasi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil keputusan bagi para eksekutif perusahaan.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah : para pemilik perusahaan, manager perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, *bankers*, para investor dan pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak-pihak lainnya. Di samping itu laporan keuangan akan dapat digunakan oleh *management* untuk :

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.
2. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah disertai wewenang dan tanggungjawab.
4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aktiva, utang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikut sertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara:

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*),
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*),
3. Pendapat pribadi (*Personal judgment*).

Dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974 halaman 14) secara terperinci menjelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka terdapat keterbatasan dalam kegunaannya, misalnya untuk maksud-

maksud investasi, sebabnya adalah bahwa data-data yang disajikan oleh akuntansi semata-mata hanya didasarkan atas “*cost*” (yang bersifat historis) dan bukan atas dasar nilainya.

2. Laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap-tiap pemakai.
3. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi.
4. Laporan keuangan itu bersifat *konservatif* dalam sikapnya menghadapi ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera diperhitungkan kerugiannya.
5. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegangan pada formilnya.
6. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis.

#### **F. Analisis Rasio**

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah “*future oriented*”, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan



faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.

## G. Klasifikasi Rasio Keuangan

Menurut Agus Sartono (2001;114) bahwa analisis rasio keuangan dibagi menjadi empat kelompok rasio yaitu :

- 1) Rasio Likuiditas  
Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang jangka pendek tepat pada waktunya.
- 2) Rasio Aktivitas  
Rasio aktivitas adalah mengukur sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan.
- 3) Financial leverage ratio  
Financial leverage ratio adalah mengukur kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka endek mauun jangka panjang.
- 4) Rasio Profitabilitas  
Rasio Profitabilitas adalah mengukur seberaa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri.

## H. Rasio Likuiditas

Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yan mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutan, persediaan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan rugi-laba, laporan perubahan modal maka rasio – rasio tersebut :

### a. *Current ratio*

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Semakin tinggi current ratio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka endek. Aktiva lancar yang dimaksud termasuk kas, piutang, surat berharga dan persediaan. Dari aktiva lancar tersebut, persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid dibanding dengan yang lain.

b. *Acid Test Ratio*

$$\text{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Rasio ini seperti halnya current ratio, tetapi hanya memperhitungkan aktiva lancar yang benar-benar liquid saja, yakni aktiva lancar di luar persediaan. Pengertian likuiditas sebenarnya mengandung dua dimensi, yaitu :

- 1) waktu yang diperlukan untuk mengubah aktiva menjadi kas,
- 2) kepastian harga yang akan terjadi.

Dengan demikian diantara ketiga elemen aktiva lancar tersebut memang piutang lebih likuid dibanding dengan persediaan dan memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mengubah menjadi kas.

## I. Rasio Aktivitas

Salah satu tujuan manajer keuangan adalah menentukan seberapa besar efisiensi investasi pada berbagai aktivitas. Dengan kata lain rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal,

kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

Periode pengumpulan piutang, yaitu rata-rata hari yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Biasanya ditentukan dengan membagi piutang dengan rata-rata penjualan harian. Ada yang menggunakan piutang rata-rata yang dibagi dengan penjualan kredit, hal ini dilakukan apabila piutang awal tahun sangat berbeda dengan piutang akhir tahun.

a. Periode pengumpulan piutang

$$\text{Periode pengumpulan piutang} = \frac{\text{Piutang} \times 360}{\text{Penjualan Kredit}}$$

b. Perputaran piutang

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang}} \times 100\%$$

Kedua rasio tersebut berhubungan, di mana hari dalam satu tahun, 360 dibagi dengan periode pengumpulan piutang akan menghasilkan perputaran piutang. Apabila piutang berfluktuasi sangat besar maka sebaiknya menggunakan piutang rata-rata.

Terlalu tinggi periode pengumpulan piutang itu berarti bahwa kebijakan kredit terlalu liberal atau bebas, akibatnya timbul *bed-debt* dan investasi dalam piutang menjadi terlalu besar akibatnya keuntungan akan menurun. Sebaliknya periode pengumpulan piutang yang terlalu pendek berarti kebijakan kredit terlalu ketat dan besar kemungkinannya

perusahaan akan kehilangan untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu standar kredit perlu diperlonggar.

c. Perputaran persediaan

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

Penggunaan rata-rata di sini, seperti halnya perputaran piutang dimaksudkan agar lebih tepat lagi apabila persediaan mengalami perubahan yang cukup besar. Yang penting adalah apabila kita akan membandingkan dengan yang telah dicapai pada periode sebelumnya maka harus konsisten. Perusahaan yang perputaran persediaannya makin tinggi itu berarti makin efisien, tetapi perputaran yang terlalu tinggi juga tidak baik, untuk itu perlu ditentukan keseimbangan.

Perputaran aktiva tetap, adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap neto. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetapnya seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor.

d. Perputaran aktiva tetap

$$\text{Perputaran aktiva tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}}$$

Perputaran total aktiva, menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan

penjualan dan mendapatkan laba. Tingkat perputaran ini juga ditentukan oleh perputaran elemen aktiva itu sendiri.

$$\text{Perputaran total aktiva} = \frac{\text{penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### ***J. Financial Leverage***

*Financial Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi, yaitu :

- a. Pemberian kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan,
- b. Dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat,
- c. Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan.

##### ***1) Debt Ratio***

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

2) *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

3) *Time Interest Earned Ratio*

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

*Time interest earned ratio*, adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.

4) *Fixed Charge Coverage Ratio*

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran sewa}}$$

*Fixed Charge Coverage Ratio*, mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.

5) *Debt Service Coverage*

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran pokok pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}$$

*Debt Service Coverage*, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan *leverage* yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.



## K. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

### a. *Gross Profit Margin*

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

### b. *Net Profit Margin*

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Apabila *gross profit margin* selama satu periode tidak berubah sedangkan *Net Profit Margin*nya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan.

### c. *Return On Investment*

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

*Return On Investment* atau *Return On Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

d. *Return On Equity*

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

*Return On Equity* atau *Return On Net Worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan semakin besar.

e. Profit Margin

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Penjualan}}$$

f. Rentabilitas Ekonomi

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dari hasil penjualan. Dengan menggunakan hubungan antara perputaran aktiva dengan *net profit margin* maka dapat dicari *earning power* atau *return on assets ratio*. *Earning power* adalah hasil kali *net profit margin* dengan perputaran aktiva.

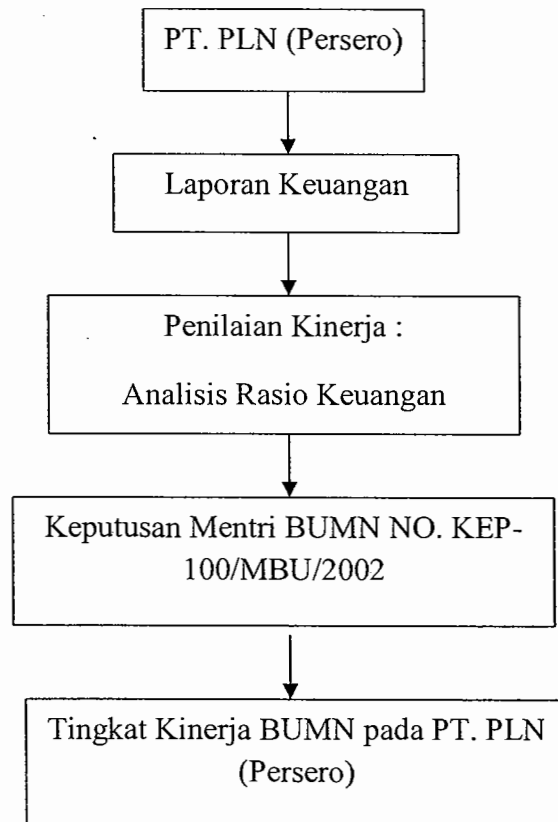
g. *Earning Power*

$$\text{Earning Power} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

*Earning Power*, merupakan tolok ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan *net profit margin* tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda.

#### L. Kerangka Berpikir

Secara ringkas kerangka berpikir secara konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1:Kerangka Konseptual

## **M. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat rasio likuiditas atas laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?
2. Bagaimana tingkat rasio aktivitas atas laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?
3. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas atas laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?
4. Bagaimana tingkat rasio rentabilitas atas laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002?

### **BAB III METODE PEMBAHASAN**

#### **A. Subjek dan Objek**

Subjek dari penelitian ini adalah pihak yang memberikan informasi mengenai laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 ialah Direktur Keuangan PT. PLN (Persero). Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah data-data yang diteliti ialah laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 yang telah di audit.

#### **B. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang merupakan Laporan Keuangan yang telah disusun oleh bagian keuangan pada PT. PLN (Persero) yang telah diaudit serta yang telah dipublikasikan.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dengan menggunakan metode ini peneliti mendapatkan beberapa data, antara lain : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Ekuitas Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa. Sedangkan alat untuk mengukurnya adalah analisis likuiditas, aktivitas,

profitabilitas dan rentabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari modal yang digunakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor : KEP-100/MBU/2002, pada kasus ini peneliti hanya melakukan pembahasan mengenai Aspek Keuangan PT. PLN (Persero) untuk tahun 2012 adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

a. *Return On Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2 : Daftar skor penilaian ROE

| ROE (100%)      | Skor  |           |
|-----------------|-------|-----------|
|                 | Infra | Non Infra |
| 15 < ROE        | 15    | 20        |
| 13 < ROE ≤ 15   | 13,5  | 18        |
| 11 < ROE ≤ 13   | 12    | 16        |
| 9 < ROE ≤ 11    | 10,5  | 14        |
| 7,9 < ROE ≤ 9   | 9     | 12        |
| 6,6 < ROE ≤ 7,9 | 7,5   | 10        |
| 5,3 < ROE ≤ 6,6 | 6     | 8,5       |
| 4 < ROE ≤ 5,3   | 5     | 7         |
| 2,5 < ROE ≤ 4   | 4     | 5,5       |
| 1 < ROE ≤ 2,5   | 3     | 4         |
| 0 < ROE ≤ 1     | 1,5   | 2         |
| ROE < 0         | 1     | 0         |

b. *Return On Investment* (ROI)

$$ROI = \frac{EBIT + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

| ROI (100%) | Skor  |           |
|------------|-------|-----------|
|            | Infra | Non Infra |
| 18 < ROI   | 10    | 15        |



| ROI (100%)       | Skor  |           |
|------------------|-------|-----------|
|                  | Infra | Non Infra |
| 15 < ROI <= 18   | 9     | 13,5      |
| 13 < ROI <= 15   | 8     | 12        |
| 12 < ROI <= 13   | 7     | 10,5      |
| 10,5 < ROI <= 12 | 6     | 9         |
| 9 < ROI <= 10,5  | 5     | 7,5       |
| 7 < ROI <= 9     | 4     | 6         |
| 5 < ROI <= 7     | 3,5   | 5         |
| 3 < ROI <= 5     | 3     | 4         |
| 1 < ROI <= 3     | 2,5   | 3         |
| 0 < ROI <= 1     | 2     | 2         |
| ROI < 0          | 0     | 1         |

c. *Cash Ratio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4 : Daftar skor penilaian *cash ratio*

| Cash Ratio = x (%) | Skor  |           |
|--------------------|-------|-----------|
|                    | Infra | Non Infra |
| x >= 35            | 3     | 5         |
| 25 <= x < 35       | 2,5   | 4         |
| 15 <= x < 25       | 2     | 3         |
| 10 <= x < 15       | 1,5   | 2         |
| 5 <= x < 10        | 1     | 1         |
| 0 <= x < 5         | 0     | 0         |

d. *Current ratio*

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 5 : Daftar skor penilaian *current ratio*

| Current Ratio = x (%) | Skor  |           |
|-----------------------|-------|-----------|
|                       | Infra | Non Infra |
| 125 <= x              | 3     | 5         |
| 110 <= x < 125        | 2,5   | 4         |
| 100 <= x < 110        | 2     | 3         |
| 95 <= x < 100         | 1,5   | 2         |
| 90 <= x < 95          | 1     | 1         |

| Current Ratio = x (%) | Skor  |           |
|-----------------------|-------|-----------|
|                       | Infra | Non Infra |
| x < 90                | 0     | 0         |

e. *Collection Periods (CP)*

$$CP = \frac{\text{Total Puitang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Tabel 6: Daftar skor penilaian *Collection Periods*

| CP = x (hari)  | Perbaikan = x (%) | Skor  |           |
|----------------|-------------------|-------|-----------|
|                |                   | Infra | Non Infra |
| x <= 60        | x > 35            | 4     | 5         |
| 60 < x <= 90   | 30 < x <= 35      | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x <= 120  | 25 < x <= 30      | 3     | 4         |
| 120 < x <= 150 | 20 < x <= 25      | 2,5   | 3,5       |
| 150 < x <= 180 | 15 < x <= 20      | 2     | 3         |
| 180 < x <= 210 | 10 < x <= 15      | 1,6   | 2,4       |
| 210 < x <= 240 | 6 < x <= 10       | 1,2   | 1,8       |
| 240 < x <= 270 | 3 < x <= 6        | 0,8   | 1,2       |
| 270 < x <= 300 | 1 < x <= 3        | 0,4   | 0,6       |
| 300 < x        | 0 < x <= 1        | 0     | 0         |

f. *Perputaran Persediaan*

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

| PP = x<br>(hari) | Perbaikan = x<br>(hari) | Skor  |           |
|------------------|-------------------------|-------|-----------|
|                  |                         | Infra | Non Infra |
| x <= 60          | 35 < x                  | 4     | 5         |
| 60 < x <= 90     | 30 < x <= 35            | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x <= 120    | 25 < x <= 30            | 3     | 4         |
| 120 < x <= 150   | 20 < x <= 25            | 2,5   | 3,5       |
| 150 < x <= 180   | 15 < x <= 20            | 2     | 3         |
| 180 < x <= 210   | 10 < x <= 15            | 1,6   | 2,4       |
| 210 < x <= 240   | 6 < x <= 10             | 1,2   | 1,8       |
| 240 < x <= 270   | 3 < x <= 6              | 0,8   | 1,2       |
| 270 < x <= 300   | 1 < x <= 3              | 0,4   | 0,6       |

## g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

| TATO = x (%)  | Perbaikan = x (%) | Skor  |           |
|---------------|-------------------|-------|-----------|
|               |                   | Infra | Non Infra |
| 120 < x       | 20 < x            | 4     | 5         |
| 105 < x ≤ 120 | 15 < x ≤ 20       | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x ≤ 105  | 10 < x ≤ 15       | 3     | 4         |
| 75 < x ≤ 90   | 5 < x ≤ 10        | 2,5   | 3,5       |
| 60 < x ≤ 75   | 0 < x ≤ 5         | 2     | 3         |
| 40 < x ≤ 60   | x ≤ 0             | 1,5   | 2,5       |
| 20 < x ≤ 40   | x < 0             | 1     | 2         |
| x ≤ 20        | x < 0             | 0,5   | 1,5       |

## h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

| TMS terhadap TA (%) = X | Skor  |           |
|-------------------------|-------|-----------|
|                         | Infra | Non Infra |
| x < 0                   | 0     | 0         |
| 0 ≤ x < 10              | 2     | 4         |
| 10 ≤ x < 20             | 3     | 6         |
| 20 ≤ x < 30             | 4     | 7,25      |
| 30 ≤ x < 40             | 6     | 10        |
| 40 ≤ x < 50             | 5,5   | 9         |
| 50 ≤ x < 60             | 5     | 8,5       |
| 60 ≤ x < 70             | 4,5   | 8         |
| 70 ≤ x < 80             | 4,25  | 7,5       |
| 80 ≤ x < 90             | 4     | 7         |
| 90 ≤ x < 100            | 3,5   | 6,5       |

Pada pembahasan ini aspek yang digunakan hanya aspek keuangan pada PT. PLN (Persero) maka penentuan kategori penilaian tingkat kesehatan PT. PLN (Persero) diinterpolasi dengan asumsi total nilai 50 sama dengan 100%. Total nilai 50 ini diperoleh dari total nilai maksimal yang ditentukan oleh Kementrian BUMN dengan No: KEP-100/MBU/2002.

Dengan nilai interpolasi  $50 \sim 100\%$  maka kategori penilaian tingkat kesehatan BUMN sebagai berikut :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :
  1. AAA apabila total (TS) lebih besar dari 47,5,
  2. AA apabila  $40 < TS \leq 47,5$ ,
  3. A apabila  $32,5 < TS \leq 40$ .
- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
  1. BBB apabila  $25 < TS \leq 32,5$ ,
  2. BB apabila  $20 < TS \leq 25$ ,
  3. B apabila  $15 < TS \leq 20$ .
- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
  1. CCC apabila  $10 < TS \leq 15$ ,
  2. CC apabila  $5 < TS \leq 10$ ,
  3. C apabila  $TS \leq 5$ .

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Perusahaan**

##### **1. Pendirian Perusahaan**

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bergerak dibidang usaha Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa lain terkait kelistrikan. PT. PLN ini berpusat di Jakarta dengan alamat di jalan Trunojoyo Blok-M No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. PT. PLN ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, dengan nama Jawatan Listrik dan Gas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dasar hukum pendirian BUMN ini berdasarkan pada :

- a. Peraturan Pemerintah No1/S.D. tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas.
- b. Peraturan Pemerintah No 67 tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara.
- c. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara.
- d. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara.
- e. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero).

## 2. Sejarah PT. PLN

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia bermula sejak akhir abad ke-19, melalui pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri di beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan perkebunan teh. Hingga kemudian antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di akhir tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti pembentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2012 telah berkembang menjadi 32,901 MW.

Tonggak sejarah PT. PLN mulai dari akhir abad 19 sampai dengan abad 20 antara lain adalah sebagai berikut :

a. Akhir Abad 19

Perusahaan-perusahaan Belanda dibidang Pabrik Gula dan Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

b. Tahun 1942 sampai dengan tahun 1945

Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil alih Jepang.



- c. Pada tanggal 27 Oktober 1945  
Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- d. Pada tanggal 1 Januari 1961  
Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas.
- e. Pada tanggal 1 Januari 1965  
BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.
- f. Tahun 1970  
Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970.
- g. Tahun 1972  
Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
- h. Tahun 1992  
Tahun pertama mendapatkan dana dari pasar modal domestik, melalui penerbitan Obligasi PLN I.

i. Tahun 1994

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta no 169 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta.

j. Tahun 2005

PLN memulai program Transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia.

k. Tahun 2006

Sesuai Peraturan Presiden no 71 tahun 2006, PLN ditugasi untuk membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I).

l. Tahun 2009

Undang-undang No 30 tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

m. Tahun 2010

1) Sesuai Peraturan Presiden No.4. tahun 2010, PLN ditugasi untuk membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 10.000 MW tahap kedua (FTP II).

2) PLN mulai menerapkan teknologi sistem pengelolaan tagihan terpadu melalui penerapan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST).

- 3) PLN mulai memperkenalkan sistem listrik Prabayar untuk meningkatkan mutu layanan dan mengamankan pendapatan.

### 3. Bidang Usaha PT. PLN

Sesuai UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan dan Anggaran Dasar Perusahaan Akta Notaris Lenny Janis Ishak S. H., No.2 tanggal 1 Juli 2008, bidang usaha PLN, adalah:

- a. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
  - 1) Pembangkitan tenaga listrik,
  - 2) Penyaluran tenaga listrik,
  - 3) Distribusi tenaga listrik,
  - 4) Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik,
  - 5) Pengembangan penyediaan tenaga listrik,
  - 6) Penjualan tenaga listrik.
- b. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
  - 1) Konsultasi ketenagalistrikan,
  - 2) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan,
  - 3) Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan,
  - 4) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan,
  - 5) Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik,
  - 6) Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik,
  - 7) Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

c. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik,
- 2) Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik,
- 3) Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan,
- 4) Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan,
- 5) Usaha jasa ketenagalistrikan.

Lebih lanjut lagi, bidang usaha PLN mencakup juga:

- a. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
- b. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.
- c. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari: Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA); Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik

Tenaga Bayu (PLTB). PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta.

d. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.

#### 4. Visi dan Misi PT. PLN

##### a. Visi

“Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”.

##### b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

#### 5. Kepemilikan Saham

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. PT PLN (Persero) hingga saat ini belum melakukan penawaran perdana saham (IPO). Namun Perseroan telah menerbitkan beberapa seri obligasi korporasi, sukuk, dan obligasi global.

## B. Analisis Data

Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas tahun 2012, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis dan evaluasi terhadap aspek keuangan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

### 1. Aspek Keuangan

Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap rasio-rasio sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Berikut adalah data yang dipergunakan untuk menghitung rasio keuangan PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Tabel 10 : Data Keuangan yang Digunakan untuk Menghitung Rasio Keuangan

| Nama Akun                   | 2012                   | 2011                   |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Kas dan Setara Kas          | Rp 22.639.853.000.000  | -                      |
| Piutang Usaha               | Rp 3.851.920.000.000   | -                      |
| Persediaan                  | Rp 16.738.446.000.000  | -                      |
| Aktiva Lancar               | Rp 68.639.956.000.000  | -                      |
| Pekerjaan Dalam Pelaksanaan | Rp 102.810.172.000.000 | Rp 302.489.947.000.000 |
| Total Aktiva                | Rp 540.705.764.000.000 | Rp 467.782.603.000.000 |

| Nama Akun            | 2012                     | 2011                    |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Kewajiban Lancar     | Rp 74.602.903.000.000    | -                       |
| Modal Sendiri        | Rp 150.599.670.000.000   | -                       |
| Pendapatan Usaha     | Rp 232.656.456.000.000   | Rp 208.017.823.000.000  |
| Pendapatan Non Usaha | (Rp 28.5509.278.000.000) | (Rp 16.863.228.000.000) |
| Penyusutan           | Rp 19.499.221.000.000    | -                       |
| EBIT                 | Rp 1.031.728.000.000     | -                       |
| Laba Setelah Pajak   | Rp 3.205.524.000.000     | -                       |

Dalam penilaian aspek keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 menggunakan metode penilaian perhitungan rasio-rasio keuangan. Indikator-indikator perhitungan aspek keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kas/ *Cash Ratio*

Rasio Kas PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 30,85%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk rasio kas adalah 2,5 karena rasio kas PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 30,85%, karena antara  $25 \leq x < 35\%$  maka mendapatkan skor 2,5. Dengan perolehan skor 2,5 maka rasio kas PT. PLN (Persero) hampir mendekati skor tertinggi dari yang ditetapkan Kementrian BUMN yaitu dengan skor 3.

Dengan pencapaian rasio kas yang mencapai 30,85% ini menunjukkan bahwa posisi kas pada akhir tahun lebih tinggi daripada kewajiban lancarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam penyediaan dana tunai untuk membiayai operasi perusahaan atau untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

Berikut ini adalah perhitungan *Cash ratio* PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Kas dan Setara Kas = Rp 22.639.853.000.000

Investasi Jangka Pendek = Rp 378.208.000.000 +  
=Rp 23.018.061.000.000

Kewajiban Lancar =Rp 74.602.903.000.000

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Rp 23.018.061.000.000}}{\text{Rp 74.602.903.000.000}} \times 100\%$$

$$= 30,85\%$$

b. Rasio Lancar/ *Current Ratio*

Rasio Lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 92,01%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk rasio lancar adalah 1 karena rasio lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 92,01%, karena berada antara  $90 \leq x < 95\%$  maka mendapatkan skor 1.



Dengan pencapaian rasio lancar yang mendapatkan skor 1 ini menunjukkan bahwa belum seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) ini dapat menutupi seluruh kewajiban lancarnya. Hal ini terjadi karena posisi akhir aktiva lancar PT. PLN (Persero) lebih sedikit dibandingkan dengan posisi akhir kewajiban lancarnya.

Berikut ini adalah perhitungan *Current Ratio* PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio} &= \frac{\text{Rp } 68.639.956.000.000}{\text{Rp } 74.602.903.000.000} \times 100\% \\ &= 92,01\% \end{aligned}$$

c. Perputaran Persediaan (PP)

Rasio Perputaran Persediaan PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 26,26 hari. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk rasio perputaran persediaan adalah 4 karena rasio perputaran persediaan PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 26,26 hari, karena berada antara  $x \leq 60$  hari maka mendapatkan skor 4. Dengan perolehan skor 4 maka rasio perputaran persediaan PT. PLN (Persero) memperoleh skor tertinggi dari yang ditetapkan Kementrian BUMN yaitu dengan skor 4.

Rasio perputaran persediaan ini menunjukkan berapa lama persediaan itu disimpan sebelum persediaan tersebut dijual ataupun digunakan. Semakin cepat waktu perputaran persediaan yang diperoleh maka semakin baik, apabila waktu yang diperoleh perputaran persediaan terlalu tinggi atau semakin lama dapat menandakan adanya kekurangan persediaan ataupun mengakibatkan adanya kerusakan pada persediaan yang tidak digunakan semakin banyak. Pencapaian tingkat perputaran persediaan yang mencapai bobot angka tertinggi yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN maka hal ini menunjukkan efektivitas operasional perusahaan semakin baik karena persediaan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan pendapatan.

Berikut ini adalah perhitungan PP PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

$$PP = \frac{Rp\ 16.738.446.000.000}{Rp\ 232.656.456.000.000} \times 365 \text{ hari}$$

$$= 26,26 \text{ hari}$$

d. *Collection Periods* (CP)

*Collection Periods* PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 6,04 hari. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk *Collection Periods* adalah 4 karena *Collection*

*Periods* PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 6,40 hari, karena antara  $x \leq 60$  hari maka mendapatkan skor 4. Dengan perolehan skor 4 maka *Collection Periods* PT. PLN (Persero) memperoleh skor tertinggi dari yang ditetapkan Kementerian BUMN yaitu dengan skor 4. Dalam *Collection Periods* PT. PLN (Persero) ini tidak ada perbaikan *Collection Periods* dikarenakan hampir sama dengan *Collection Periods* tahun 2011 dengan 6,15 hari.

Rasio *Collection Periods* digunakan untuk mengetahui lamanya hasil penjualan tertanam dalam bentuk piutang usaha. Rasio *Collection Periods* PT. PLN (Persero) tahun 2012 sebesar 6,04 hari yang jika dibulatkan menjadi 6 hari maka hal ini menunjukkan uang hasil dari penjualan akan diterima 6 hari sejak terjadinya penjualan tersebut dilakukan. Pencapaian tingkat *Collection Periods* pada bobot yang maksimal menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam melakukan pencairan piutang usaha sangat baik sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk modal kerja perusahaan.

Berikut ini adalah perhitungan CP PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$CP = \frac{\text{Total Puitang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

$$CP = \frac{\text{Rp } 3.851.920.000.000}{\text{Rp } 232.656.456.000.000} \times 365 \text{ hari}$$

$$= 6,04 \text{ hari}$$

e. Imbalan Investasi/ *Return On Investment* (ROI)

ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 4,67%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk ROI adalah 3 karena ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 4,67%, karena antara  $3 < \text{ROI} \leq 5 \%$  maka PT. PLN (Persero) mendapatkan skor 3.

Dengan perolehan skor ini berarti perusahaan tidak berhasil mencapai tingkat ROI dengan skor tinggi. Pencapaian tingkat ROI yang rendah tidak mencapai maksimal menunjukkan bahwa kinerja perusahaan masih kurang baik dalam menghasilkan laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan bila dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. ROI berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengelola aktiva yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasioanal untuk memperoleh keuntungan. Upaya untuk mengelola aktiva secara maksimal dengan cara menambah jumlah proyek yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero).

Berikut ini adalah perhitungan ROI PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$ROI = \frac{EBIT + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Laba Sebelum Pajak = Rp 1.031.728.000.000

Penyusutan = Rp 19.499.221.000.000 +

EBIT + Penyusutan = Rp 20.530.949.000.000

Total Aktiva = Rp 540.705.764.000.000

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan = (Rp 102.810.172.000.000)

*Capital Employed* = Rp 437.895.592.000.000

$$ROI = \frac{\text{Rp 20.530.949.000.000}}{\text{Rp 437.895.592.000.000}} \times 100\%$$

$$= 4,67\%$$

f. Imbalan Kepada Pemegang Saham/*Return On Equity* (ROE)

ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 2,13%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk ROE adalah 3 karena ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 2,13%, karena antara  $1 < ROE \leq 2,5 \%$  maka mendapatkan skor 3. Dengan pencapaian ROE sebesar 2,13% ini belum menunjukkan kinerja perusahaan yang maksimal dikarenakan ROE PT. PLN (Persero) hanya mendapatkan skor 3.

Berikut ini adalah perhitungan ROE PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

$$ROE = \frac{\text{Rp 3.205.524.000.000}}{\text{Rp 150.599.670.000.000}} \times 100\%$$

$$= 2,13\%$$

g. Perputaran Total Aset/ *Total Asset Turn Over* (TATO)

TATO PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 46,62%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk TATO adalah 1,5 karena TATO PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 46,62%, karena berada antara  $40 \leq x < 60\%$  maka mendapatkan skor 1,5. Pada tahun 2011 TATO PT. PLN (Persero) mencapai angka 51,70%, hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar 4,90%. Dengan adanya selisih ini memberikan perbaikan skor sehingga menjadi 2. Hal ini terjadi dikarenakan perbaikan 4,90% berada pada  $0 < x \leq 5$  dengan bobot 2.

Rasio TATO berfungsi untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dalam perhitungan rasio TATO, *capital employed* yaitu mengurangi total aktiva dengan aktiva tetap dalam pelaksanaan. Sedangkan total pendapatan yang berasal dari total pendapatan usaha maupun non usaha tetapi tidak termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan aktiva tetap. Pencapaian TATO PT. PLN

(Persero) tahun 2012 ini masih jauh dari tingkat bobot maksimal yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN yaitu dengan bobot nilai sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan belum maksimal menghasilkan pendapatan dengan didukung oleh aset perusahaan yang tersedia.

Berikut ini adalah perhitungan TATO PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Pendapatan 2012

Pendapatan Usaha = Rp 232.656.456.000.000

Pendapatan Non Usaha = (Rp 28.509.278.000.000)  
= Rp 204.147.178.000.000

*Capital Employed* 2012

Total Aktiva = Rp 540.705.764.000.000

Pekerjaan Dalam Pelaksana = (Rp 120.810.172.000.000)  
= Rp 437.895.592.000.000

TATO 2012

$$\text{TATO} = \frac{\text{Rp 204.147.178.000.000}}{\text{Rp 437.895.592.000.000}} \times 100\%$$

$$= 46,62\%$$

Pendapatan 2011

Pendapatan Usaha = Rp 208.017.823.000.000

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan Non Usaha} &= \text{(Rp 16.863.228.000.000)} \\ &= \text{Rp 191.154.595.000.000}\end{aligned}$$

*Capital Employed 2011*

$$\begin{aligned}\text{Total Aktiva} &= \text{Rp 467.782.603.000.000} \\ \text{Pekerjaan Dalam Pelaksana} &= \text{(Rp 98.057.296.000.000)} \\ &= \text{Rp 369.725.307.000.000}\end{aligned}$$

TATO 2011

$$\begin{aligned}\text{TATO} &= \frac{\text{Rp 191.154.595.000.000}}{\text{Rp 369.725.307.000.000}} \times 100\% \\ &= 56,26\%\end{aligned}$$

$$\text{Tingkat TATO} \quad 1,5$$

$$\text{Perbaikan TATO (4,90\%)} \quad 2$$

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 2.

- h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS Terhadap TA)

TMS Terhadap TA PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 27,85%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk TMS Terhadap TA adalah 4 karena TMS Terhadap TA PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 27,85%, karena berada antara  $20 \leq x < 30$  % maka mendapatkan bobot 4.

Pencapaian tingkat rasio modal sendiri terhadap total aktiva yang belum mencapai skor tertinggi yang ditetapkan oleh



Kementrian BUMN yaitu dengan bobot 6, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum optimal dalam mengelola modal sendiri PLN dan aktiva. Hal ini disebabkan oleh rendahnya modal sendiri atau terlalu besar aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio TMS bermanfaat untuk mengukur sumber pembiayaan utang sebagai pembiayaan yang berbiaya tetap. Semakin rendah rasio ini menunjukkan perusahaan lebih banyak menggunakan utang-utang untuk membiayai aset yang dimilikinya. Rendahnya rasio TMS terhadap TA ini dapat membuat ROE menjadi rendah dan tingginya jumlah utang dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar bunga maupun pokok pinjaman.

Berikut ini adalah perhitungan TMS thd TA PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 :

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{TMS terhadap TA} &= \frac{\text{Rp } 150.599.670.000.000}{\text{Rp } 540.705.764.000.000} \times 100\% \\ &= 27,83 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, mengenai indikator-indikator penilaian aspek keuangan. Maka perolehan nilai pada setiap rasio diatas dapat disimpulkan pada tabel berikut ini :

### Hasil Perhitungan Indikator-Indikator Aspek Keuangan

Tabel 11 : Hasil Perhitungan Aspek Keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012

| Keterangan  | Nilai                                   | Bobot                            |
|---|---|----------------------------------|
| <i>Cash Ratio</i> / Rasio Kas   | 30,85%                                  | 2,5                              |
| <i>Current Ratio</i> / Rasio Lancar                                   | 92,01%                                  | 1                                |
| Perputaran Persediaan (PP)  | 26,26 Hari                              | 4                                |
| <i>Collection Periods</i> (CP)  | 6,04 Hari                               | 4                                |
| ROI   | 4,67%                                   | 3                                |
| ROE   | 2,13%                                   | 3                                |
| Perputaran Total Aset/ Total<br><i>Asset Turn Over</i> (TATO)         | 2012 :<br>Nilai : 46,62%<br>Bobot : 1,5 | Perbaikan TATO<br>(4,90%)<br>=2% |
|   | 2011 :<br>Nilai : 56,26%<br>Bobot : 1,5 |                                  |
| Rasio Total Modal Sendiri<br>Terhadap Total Aset (TMS<br>Terhadap TA) | 27,85%                                  | 4                                |
| TOTAL   |   | 23,5                             |

Dari perhitungan tabel diatas didapat total skor penilaian aspek keuangan PT. PLN (Persero) adalah sebesar 23,5 dengan ini maka total skor tersebut diinterpolasikan dengan asumsi bahwa total skor tertinggi adalah 50. Maka 50 ini dikalikan dengan skor maksimal yan ditetapkan oleh Kementrian BUMN dengan No:KEP-100/MBU/2002 yaitu 50% maka menghasilkan angka 25% yang diasumsikan sama dengan 100%.

$$\text{Skor Penilaian} = (23,5\% \times 50\%)$$

$$= 11,75\%$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Interpolasi} &= \frac{11,75}{25} \times 100\% \\ &= 47\end{aligned}$$

Dari tabel tersebut diatas total bobot skor pada aspek keuangan PT. PLN (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, total bobot seharusnya yaitu dengan skor 50, namun pada tahun 2012 PT. PLN (Persero) hanya memperoleh total bobot 23,5 dari total keseluruhan rasio yang diperhitungkan. Dengan nilai interpolasi yang diperoleh pada perhitungan diatas yang menghasilkan angka 47% maka tingkat kesehatan PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 memperoleh predikat “SEHAT” dengan golongan AA (kategori sehat).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dari Tugas Akhir ini adalah :

1. *Cash Ratio*/Rasio Kas PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang sehat dalam penyediaan dana tunai untuk membiayai operasi perusahaan atau untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.
2. *Current Ratio*/Rasio Lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa belum seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) ini dapat menutupi seluruh kewajiban lancarnya. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang sehat karena posisi akhir aktiva lancar PT. PLN (Persero) lebih sedikit dibandingkan dengan posisi akhir kewajiban lancarnya.
3. Perputaran Persediaan (PP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan efektivitas operasional perusahaan dalam keadaan yang sehat karena persediaan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan.
4. *Collection Periods* (CP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam melakukan pencairan piutang usaha mempunyai kemampuan yang sehat sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk modal kerja perusahaan.
5. ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan masih kurang sehat dalam menghasilkan laba sebelum bunga,

pajak dan penyusutan bila dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan perusahaan kurang sehat dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasional guna memperoleh keuntungan.

6. ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang sehat dalam mengelola kegiatannya untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham.
7. Perputaran Total Aset/ *Total Asset Turn Over* (TATO) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam keadaan yang kurang sehat untuk menghasilkan pendapatan dengan didukung oleh aset perusahaan yang tersedia.
8. Rendahnya rasio TMS terhadap TA PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pencapaian modal sendiri terhadap total aktiva dalam keadaan yang kurang sehat guna mengelola kedua komponen tersebut. Hal ini disebabkan karena rendahnya modal sendiri atau terlalu besarnya aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya lebih memberikan pemahaman GCG yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi budaya perusahaan, sistem pengendalian intern,

aspek-aspek hukum yang akan menciptakan pengendalian yang memadai dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sebaiknya mendapatkan perhatian sebelum mengambil keputusan investasi. Sehingga tidak hanya berkisar pada rasio keuangan tetapi juga menggunakan faktor lain mengenai operasional perusahaan.
3. Sebaiknya dalam memutuskan suatu investasi harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga investasi tersebut dapat berhasil serta menguntungkan bagi perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Sartono. (2001). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

IAI. (2002). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Ihyaul Ulum. (2009). Audit Sektor Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

[Http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/1190263862.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/1190263862.pdf). Diunduh pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Munawir. (2001). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

# LAMPIRAN



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND JANUARY 1, 2011/DECEMBER 31, 2010  
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

|   |       | 31 Desember/<br>December 31,<br>2012 | 31 Desember/<br>December 31,<br>2011 *) | 1 Januari/<br>January 1,<br>2011/<br>31 Desember/<br>December 31,<br>2010 *) |   |
|---|-------|--------------------------------------|---|--|---|
| Catatan/<br>Notes   |       |                                      |   |  |   |
| <b>ASET</b>   |       |                                      |   |  | <b>ASSETS</b>   |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>  |       |                                      |   |  | <b>NONCURRENT ASSETS</b>  |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 150.988.899 juta tanggal 31 Desember 2012, Rp 132.978.177 juta tanggal 31 Desember 2011 dan Rp 117.645.247 juta tanggal 1 Januari 2011     | 6     | 358.024.484                          | 302.489.947                             | 247.561.715  | Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of 150,988,899 million as of December 31, 2012, Rp 132,978,177 million as of December 31, 2011 and Rp 117,645,247 million as of January 1, 2011 |
| Pekerjaan dalam pelaksanaan   | 7     | 102.810.172                          | 98.057.296                              | 106.839.853  | Construction in progress  |
| Properti investasi  | 8     | 158.280                              | 152.796                                 | 145.020  | Investment properties   |
| Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama   | 9     | 1.625.439                            | 1.142.850                               | 883.012  | Investments in associates and joint ventures  |
| Aset pajak tangguhan  | 49    | 200.713                              | 18.018                                  | 11.278   | Deferred tax assets   |
| Aset tidak digunakan dalam operasi  | 10    | 1.483.089                            | 1.713.669                               | 1.299.503  | Assets not used in operations   |
| Piutang pihak berelasi  | 11,54 | 22.329                               | 212.709                                 | 232.250  | Receivables from related parties  |
| Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya   | 12    | 4.792.736                            | 3.889.763                               | 2.407.587  | Restricted cash in banks and time deposits  |
| Piutang lain-lain   | 18    | 303.058                              | 355.270                                 | 319.567  | Other receivables   |
| Aset tidak lancar lain  | 13    | 2.645.508                            | 1.497.943                               | 1.627.358  | Other noncurrent assets   |
| Jumlah Aset Tidak Lancar  |       | 472.065.808                          | 409.530.261                             | 361.327.143  | Total Noncurrent Assets   |
| <b>ASET LANCAR</b>  |       |                                      |   |  | <b>CURRENT ASSETS</b>   |
| Kas dan setara kas  | 14    | 22.639.853                           | 22.088.093                              | 19.716.798   | Cash and cash equivalents   |
| Investasi jangka pendek   | 15    | 378.208                              | 636.264                                 | 828.739  | Short-term investments  |
| Piutang usaha - setelah dikurangi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai Rp 388.227 juta tanggal 31 Desember 2012, Rp 356.147 juta tanggal 31 Desember 2011 dan Rp 330.451 juta tanggal 1 Januari 2011 | 16    | 3.851.920                            | 3.504.823                               | 2.875.168  | Trade accounts receivable - net of allowance for impairment losses of Rp 388,227 million as of December 31, 2012, Rp 356,147 million as of December 31, 2011 and Rp 330,451 million as of January 1, 2011       |
| Piutang subsidi listrik   | 17,39 | 20.565.784                           | 12.101.668                              | 9.358.747  | Receivables on electricity subsidy  |
| Piutang lain-lain   | 18    | 849.120                              | 598.750                                 | 623.506  | Other receivables   |
| Persediaan - bersih   | 19    | 16.738.446                           | 15.654.105                              | 9.927.314  | Inventories - net   |
| Pajak dibayar dimuka  | 20    | 2.562.075                            | 2.396.990                               | 550.880  | Prepaid taxes   |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka  | 21    | 1.026.080                            | 1.204.393                               | 826.907  | Prepaid expenses and advances   |
| Piutang pihak berelasi  | 11,54 | 28.470                               | 67.256                                  | 65.227   | Receivables from related parties  |
| Jumlah Aset Lancar  |       | 68.639.956                           | 58.252.342                              | 44.773.286   | Total Current Assets  |
| <b>JUMLAH ASET</b>  |       | <b>540.705.764</b>                   | <b>467.782.603</b>                      | <b>406.100.429</b>   | <b>TOTAL ASSETS</b>   |

\*) Disajikan kembali - Catatan 58

\*) As restated - Note 58

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND JANUARY 1, 2011/DECEMBER 31, 2010  
(Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued

|  |       | 31 Desember/<br>December 31,<br>2012 | 31 Desember/<br>December 31,<br>2011 *) | 1 Januari/<br>January 1,<br>2011/<br>December 31,<br>2010 *) |   |
|--|-------|--------------------------------------|---|--|---|
| Catatan/<br>Notes  |       |                                      |   |  |   |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  |       |                                      |   |  | <b>LIABILITIES AND EQUITY</b>                       |
| <b>EKUITAS</b>   |       |                                      |   |  | <b>EQUITY</b>                                       |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk                |       |                                      |   |  | Equity attributable to owners of the Company        |
| Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham                              |       |                                      |   |  | Capital stock - par value of Rp 1 million per share |
| Modal dasar - 63.000.000 saham   |       |                                      |   |  | Authorized - 63,000,000 shares                      |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh -  |       |                                      |   |  | Subscribed and paid-up -                            |
| 46.197.380 saham tahun 2012 dan 2011   |       |                                      |   |  | 46,197,380 shares in 2012 and 2011,                 |
| 46.107.154 saham tahun 2010  |       |                                      |   |  | 46,107,154 shares in 2010                           |
| Tambahan modal disetor   | 22    | 46.197.380                           | 46.197.380                              | 46.107.154   | Additional paid-in capital                          |
| Saldo laba   | 23    | 44.930.345                           | 40.050.208                              | 37.122.096   | Retained earnings                                   |
| Ditentukan penggunaannya   |       | 17.343.884                           | 13.720.014                              | 8.248.328  | Appropriated  |
| Tidak ditentukan penggunaannya   |       | 42.033.417                           | 45.948.843                              | 50.539.170   | Unappropriated                                      |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk                |       |                                      |   |  | Equity attributable to owners of the Company        |
| Kepentingan nonpengendali  |       |                                      |   |  | Non-controlling interests                           |
| Jumlah Ekuitas   |       | 150.505.026                          | 145.916.445                             | 142.016.748  | Total Equity  |
|  |       | 94.644                               | 96.391                                  | 97.027   |   |
|  |       | 150.599.670                          | 146.012.836                             | 142.113.775  |   |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>   |       |                                      |   |  | <b>NONCURRENT LIABILITIES</b>                       |
| Pendapatan ditangguhkan  | 24    | 19.228.694                           | 14.587.906                              | 10.126.136   | Deferred revenue                                    |
| Liabilitas pajak tangguhan - bersih  | 49    | 3.304.671                            | 6.384.701                               | 7.284.638  | Deferred tax liabilities - net                      |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun |       |                                      |   |  | Long-term liabilities - net of current maturities   |
| Penerusan pinjaman   | 25    | 27.294.132                           | 27.036.690                              | 22.803.597   | Two-step loans                                      |
| Utang kepada Pemerintah  | 26    | 8.707.826                            | 6.016.818                               | 2.016.668  | Government loans                                    |
| Utang sewa pembiayaan  | 27    | 107.609.232                          | 77.690.486                              | 61.406.202   | Lease liabilities                                   |
| Utang bank dan surat utang jangka menengah                                   | 28    | 54.271.679                           | 46.003.191                              | 36.400.362   | Bank loans and medium term notes                    |
| Utang obligasi   | 29    | 67.250.977                           | 55.908.388                              | 46.656.045   | Bonds payable                                       |
| Utang listrik swasta   | 30    | 5.582.143                            | 5.413.311                               | 5.536.202  | Electricity purchase payable                        |
| Utang pihak berelasi   | 31    | 9.675                                | 13.991                                  | -  | Payable to related parties                          |
| Liabilitas imbalan kerja   | 52    | 22.090.632                           | 18.967.344                              | 16.358.885   | Employee benefits obligation                        |
| Utang lain-lain  | 33    | 153.530                              | 196.508                                 | 1.368  | Other payables                                      |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang   |       | 315.503.191                          | 258.219.334                             | 208.590.103  | Total Noncurrent Liabilities                        |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>  |       |                                      |   |  | <b>CURRENT LIABILITIES</b>                          |
| Utang usaha  |       |                                      |   |  | Trade accounts payable                              |
| Pihak berelasi   | 32,54 | 14.894.376                           | 14.070.569                              | 5.712.663  | Related parties                                     |
| Pihak ketiga   | 32,57 | 10.861.230                           | 7.875.637                               | 5.698.660  | Third parties                                       |
| Utang pajak  | 34    | 1.146.104                            | 955.509                                 | 905.656  | Taxes payable                                       |
| Biaya masih harus dibayar  | 35    | 7.580.945                            | 6.060.347                               | 6.309.999  | Accrued expenses                                    |
| Uang jaminan langganan   | 36    | 6.455.405                            | 6.511.261                               | 6.544.422  | Customers' security deposits                        |
| Utang biaya proyek   | 37    | 1.226.238                            | 2.467.142                               | 3.689.316  | Project cost payable                                |
| Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                            |       |                                      |   |  | Current maturities of long-term liabilities         |
| Penerusan pinjaman   | 25    | 2.309.841                            | 2.236.422                               | 2.088.093  | Two-step loans                                      |
| Utang kepada Pemerintah  | 26    | 334.010                              | 346.372                                 | 344.065  | Government loans                                    |
| Utang sewa pembiayaan  | 27    | 3.699.829                            | 2.803.911                               | 1.901.397  | Lease liabilities                                   |
| Utang bank dan surat utang jangka menengah                                   | 28    | 7.808.344                            | 4.694.652                               | 3.343.493  | Bank loans and medium term notes                    |
| Utang obligasi   | 29    | -                                    | -                                       | 4.045.950  | Bonds payable                                       |
| Utang listrik swasta   | 30    | 206.013                              | 184.130                                 | 174.006  | Electricity purchase payable                        |
| Utang pihak berelasi   | 31,54 | 741.654                              | 663.384                                 | 577.478  | Payable to related parties                          |
| Liabilitas imbalan kerja   | 52    | 1.680.688                            | 1.611.500                               | 1.438.655  | Employee benefits obligation                        |
| Utang lain-lain  | 33    | 15.658.226                           | 13.069.597                              | 12.622.698   | Other payables                                      |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  |       | 74.602.903                           | 63.550.433                              | 55.396.551   | Total Current Liabilities                           |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>   |       | <b>390.106.094</b>                   | <b>321.769.767</b>                      | <b>263.986.654</b>   | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                            |
| <b>JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS</b>   |       | <b>540.705.764</b>                   | <b>467.782.603</b>                      | <b>406.100.429</b>   | <b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>                 |

\*) Disajikan kembali - Catatan 58

\*) As restated - Note 58

Uihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011  
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

|  | 2012                | Catatan/<br>Notes | 2011 *)             |   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| <b>PENDAPATAN USAHA</b>  |                     |                   |                     | <b>REVENUES</b>   |
| Penjualan tenaga listrik   | 126.721.647         | 38                | 112.844.853         | Sale of electricity   |
| Subsidi listrik Pemerintah   | 103.331.285         | 39                | 93.177.740          | Government's electricity subsidy  |
| Penyambungan pelanggan   | 1.306.463           | 24                | 1.008.730           | Customer connection fees  |
| Lain-lain  | 1.297.061           | 40                | 986.500             | Others  |
| <b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>   | <b>232.656.456</b>  |                   | <b>208.017.823</b>  | <b>Total Revenues</b>   |
| <b>BEBAN USAHA</b>   |                     |                   |                     | <b>OPERATING EXPENSES</b>   |
| Bahan bakar dan pelumas  | 136.535.495         | 41                | 131.157.604         | Fuel and lubricants   |
| Pembelian tenaga listrik   | 2.939.624           | 42                | 1.256.713           | Purchased electricity   |
| Sewa   | 6.963.983           | 43                | 5.775.859           | Lease   |
| Pemeliharaan   | 17.567.375          | 44                | 13.592.563          | Maintenance   |
| Kepegawaian  | 14.400.976          | 45                | 13.197.075          | Personnel   |
| Penyusutan   | 19.499.221          | 6                 | 16.254.552          | Depreciation  |
| Lain-lain  | 5.208.776           | 46                | 4.405.234           | Others  |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b>  | <b>203.115.450</b>  |                   | <b>185.639.600</b>  | <b>Total Operating Expenses</b>   |
| <b>LABA SEBELUM POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN</b>                                 | <b>29.541.006</b>   |                   | <b>22.378.223</b>   | <b>INCOME BEFORE FINANCIAL AND OTHER ITEMS</b>                              |
| <b>POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH</b>                                       |                     |                   |                     | <b>NET FINANCIAL AND OTHER ITEMS</b>  |
| Penghasilan bunga  | 384.043             |                   | 503.983             | Interest income   |
| Kerugian kurs mata uang asing - bersih   | (5.938.482)         | 55                | (1.833.390)         | Loss on foreign exchange - net  |
| Beban keuangan   | (24.612.091)        | 47                | (17.361.067)        | Financial cost  |
| Penghasilan lain-lain - bersih   | 1.657.252           | 48                | 1.827.246           | Others income - net   |
| <b>Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih</b>                                       | <b>(28.509.278)</b> |                   | <b>(16.863.228)</b> | <b>Net Financial and Other Items</b>  |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>  | <b>1.031.728</b>    |                   | <b>5.514.995</b>    | <b>INCOME BEFORE TAX</b>  |
| <b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>   | <b>2.173.796</b>    | 49                | <b>(88.880)</b>     | <b>TAX BENEFIT (EXPENSE)</b>  |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN DAN JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>                        | <b>3.205.524</b>    |                   | <b>5.426.115</b>    | <b>INCOME FOR THE YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>                   |
| <b>Laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif diatribusikan kepada :</b> |                     |                   |                     | <b>Income for the year and total comprehensive income attributable to :</b> |
| Pemilik Entitas Induk  | 3.208.444           |                   | 5.426.359           | Owners of the Company   |
| Kepentingan Nonpengendali  | (2.920)             |                   | (244)               | Non-controlling interest  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>3.205.524</b>    |                   | <b>5.426.115</b>    | <b>Total</b>  |
| <b>LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)</b>                               | <b>69.451</b>       | 50                | <b>117.594</b>      | <b>BASIC EARNINGS PER SHARE (In full Rupiah amount)</b>                     |

\*) Disajikan kembali - Catatan 58

\*) As restated - Note 58

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011  
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

|  | 2012          | 2011 *)       |  |
|--|---------------|---------------|--|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                 |               |               | <b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                          |
| Penerimaan kas dari pelanggan  | 137.486.222   | 123.313.808   | Cash receipts from customers   |
| Pembayaran kas kepada pemasok  | (167.365.322) | (153.601.871) | Cash paid to suppliers   |
| Pembayaran kas kepada karyawan   | (11.120.577)  | (10.457.035)  | Cash paid to employees   |
| Kas digunakan untuk aktivitas operasi                                  | (40.999.677)  | (40.745.098)  | Cash used in operations  |
| Penerimaan subsidi listrik   | 94.867.169    | 90.434.819    | Government subsidy received  |
| Pembayaran bunga   | (22.568.006)  | (17.774.973)  | Interest expense paid  |
| Penerimaan bunga   | 583.908       | 519.395       | Interest received  |
| Penerimaan restitusi pajak penghasilan                                 | 13.974        | 109.756       | Income tax restitution received                                      |
| Pembayaran pajak penghasilan   | (1.433.106)   | (921.971)     | Income tax paid  |
| Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi                            | 30.464.262    | 31.621.928    | Net Cash Provided by Operating Activities                            |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                               |               |               | <b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>                          |
| Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi                     | 76.805        | 34.345        | Proceeds from sale of assets not used in operations                  |
| Perolehan aset tetap   | (6.403.137)   | (7.301.505)   | Additions to property, plant and equipment                           |
| Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan                                  | (34.491.980)  | (31.856.413)  | Additions to construction in progress                                |
| Penerimaan piutang pihak berelasi                                      | 29.300        | 8.032         | Decrease in receivables from related parties                         |
| Akuisisi entitas anak  | (109.200)     | -             | Acquisition of a subsidiary  |
| Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama          | (120.321)     | (139.259)     | Acquisition of investments in associates and joint ventures          |
| Penerimaan dividen dari entitas asosiasi                               | 98.343        | 2.940         | Dividends received from associates                                   |
| Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya | (1.117.505)   | (1.703.775)   | Placement of restricted cash in banks and time deposits              |
| Pencairan investasi jangka pendek                                      | 277.689       | 196.787       | Withdrawal of short-term investments                                 |
| Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi                         | (41.760.006)  | (40.758.848)  | Net Cash Used in Investing Activities                                |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                               |               |               | <b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>                          |
| Perolehan dari penerbitan obligasi                                     | 9.615.000     | 9.035.000     | Proceeds from issuance of bonds                                      |
| Pembayaran biaya penerbitan obligasi                                   | (172.719)     | (97.531)      | Payment of bonds issuance costs                                      |
| Pembayaran utang obligasi  | (892.000)     | (3.980.250)   | Payment of bonds payable   |
| Pembayaran penerusan pinjaman  | (2.286.711)   | (2.279.438)   | Payment of two-step loans  |
| Penarikan utang kepada Pemerintah                                      | 3.000.023     | 4.499.977     | Proceeds from Government loans                                       |
| Pembayaran utang kepada Pemerintah                                     | (293.793)     | (293.793)     | Payment of Government loans  |
| Pembayaran dividen   | (3.500.000)   | (4.545.000)   | Payment of dividends   |
| Perolehan utang bank   | 69.833.045    | 58.712.266    | Proceeds from bank loans   |
| Pembayaran utang bank  | (60.185.808)  | (47.502.177)  | Payment of bank loans  |
| Pembayaran utang listrik swasta  | (169.623)     | (155.823)     | Payment of electricity purchase payable                              |
| Pembayaran utang sewa pembiayaan                                       | (3.099.923)   | (1.916.219)   | Payment of lease liabilities   |
| Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan                          | 11.847.491    | 11.477.012    | Net Cash Provided by Financing Activities                            |
| <b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>                              | 551.747       | 2.340.092     | <b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>                     |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>                                   | 22.088.093    | 19.716.798    | <b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>                |
| Kas dan setara kas awal tahun entitas anak yang diakuisisi             | 13            | 31.203        | Cash and cash equivalent at beginning of year of subsidiary acquired |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>                                  | 22.639.853    | 22.088.093    | <b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>                      |

\*) Disajikan kembali - Catatan 58

\*) As restated - Note 58

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011  
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

| Catatan/<br>Notes   | Modal ditempatkan<br>dan disetor penuh/<br>Subscribed and<br>paid-up capital<br>stock | Tambahan modal<br>disetor/<br>Additional<br>paid-in capital | Saldo laba/<br>Retained earnings             |  | Ekuitas yang<br>dapat diatribusikan<br>kepada pemilik<br>entitas induk/<br>Equity attributable<br>to owners<br>of the Company | Kepentingan<br>nonpengendali/<br>Non-controlling<br>interest | Jumlah ekuitas/<br>Total equity |  |
|---|---|---|--|--|---|--|---------------------------------|--|
|   |   |   | Ditentukan<br>penggunaannya/<br>Appropriated | Tidak ditentukan<br>penggunaannya/<br>Unappropriated |   |  |                                 |  |
|   |   |   |  |  |   |  |                                 |  |
| Saldo per 1 Januari 2011, sebagaimana<br>dipelaporan sebelumnya | 46.107.154  | 37.122.096  | 8.248.328                                    | 58.107.890   | 149.585.568   | 97.027   | 149.682.595                     | Balance as of January 1, 2011, as previously<br>reported |
| Pengaruh penerapan ISAK 8<br>secara retrospektif                | 58  | -   | -  | (7.568.820)  | (7.568.820)   | -  | (7.568.820)                     | The effects of retrospective application of<br>ISAK 8    |
| Saldo per 1 Januari 2011 setelah disajikan<br>kembali           | 46.107.154  | 37.122.096  | 8.248.328                                    | 50.539.170   | 142.016.748   | 97.027   | 142.113.775                     | Balance as of January 1, 2011, as restated               |
| Penambahan tahun berjalan                                       | 22,23   | 90.226  | 2.928.112                                    | -  | 3.018.338   | -  | 3.018.338                       | Additions during the year                                |
| Cadangan umum tahun berjalan                                    | 51  | -   | -  | 5.471.686  | (5.471.686)   | -  | -                               | Appropriation during the year                            |
| Dividen tunai   | 51  | -   | -  | -  | (4.545.000)   | (362)  | (4.545.392)                     | Cash dividends   |
| Jumlah laba komprehensif tahun berjalan                         | -   | -   | -  | 5.426.359  | 5.426.359   | (244)  | 5.426.115                       | Total comprehensive income for the year                  |
| Saldo per 31 Desember 2011                                      | 46.197.380  | 40.050.208  | 13.720.014                                   | 45.948.843   | 145.016.445   | 96.391   | 146.012.836                     | Balance as of December 31, 2011                          |
| Penambahan tahun berjalan                                       | 23  | -   | 4.880.137                                    | -  | 4.880.137   | 3.385  | 4.883.522                       | Additions during the year                                |
| Cadangan umum tahun berjalan                                    | 51  | -   | -  | 3.623.870  | (3.623.870)   | -  | -                               | Appropriation during the year                            |
| Dividen tunai   | 51  | -   | -  | -  | (3.500.000)   | (2.212)  | (3.502.212)                     | Cash dividends   |
| Jumlah laba komprehensif tahun berjalan                         | -   | -   | -  | 3.208.444  | 3.208.444   | (2.920)  | 3.205.524                       | Total comprehensive income for the year                  |
| Saldo per 31 Desember 2012                                      | 46.197.380  | 44.930.345  | 17.343.884                                   | 42.033.417   | 150.505.026   | 93.644   | 150.599.670                     | Balance as of December 31, 2012                          |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements  
which are an integral part of the consolidated financial statements.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

**Pasal 2**

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II ...../3



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

-3-

**BAB II  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

**Pasal 3**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
  - a. SEHAT, yang terdiri dari :
    - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
    - AA apabila  $80 < TS \leq 95$
    - A apabila  $65 < TS \leq 80$
  - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
    - BBB apabila  $50 < TS \leq 65$
    - BB apabila  $40 < TS \leq 50$
    - B apabila  $30 < TS \leq 40$
  - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
    - CCC apabila  $20 < TS \leq 30$
    - CC apabila  $10 < TS \leq 20$
    - C apabila  $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
  - a. Aspek Keuangan.
  - b. Aspek Operasional.
  - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.





**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 5**

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- a. Pembangunan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - d. Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV  
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

**Pasal 7**

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**Pasal 8**

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**t t d**

**ttd**

**LAKSAMANA SUKARDI**

Victor Hutapea  
NIP 060051008



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran I : 1/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**SALINAN**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

| No. | BUMN INFRA STRUKTUR                    | BUMN NON INFRA STRUKTUR                           |
|-----|--|---|
| I.  | <b>SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b> |   |
|     |  | <b>Bidang Industri Pupuk dan Semen</b>            |
|     |  | 1. PT Pupuk Sriwidjaja                            |
|     |  | 2. PT Asean Aceh Fertilizer                       |
|     |  | 3. PT Semen Baturaja                              |
|     |  | 4. PT Semen Kupang                                |
|     |  | <b>Bidang Niaga</b>                               |
|     |  | 1. PT Dhatma Niaga                                |
|     |  | 2. PT Pantja Niaga                                |
|     |  | 3. PT Cipta Niaga                                 |
|     |  | 4. PT Sarinah                                     |
|     |  | <b>Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri</b> |
|     |  | 1. PT Bhanda Ghara Reksa                          |
|     |  | 2. PT Berdikari                                   |
|     |  | 3. PT Indo Farma                                  |
|     |  | 4. PT Kirma Farma                                 |
|     |  | 5. PT Bio Farma                                   |
|     |  | 6. PT Rajawali Nusantara Indonesia                |
|     |  | 7. PT Garam                                       |
|     |  | 8. PT Industri Gelas                              |
|     |  | 9. PT Industri Soda Indonesia                     |
|     |  | 10. PT Sandang Nusantara                          |
|     |  | 11. PT Cambrics Primisima                         |
|     |  | <b>Bidang Pertambangan dan Energi</b>             |
|     |  | 1. PT Sarana karya                                |
|     |  | 2. PT Batubara Bukit Asam                         |
|     |  | 3. PT Konservasi Energi Abadi                     |
|     |  | 4. PT Batan Tehnologi                             |
|     |  | 5. PT Perusahaan Gas Negara                       |
|     |  | <b>Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan</b>   |
|     |  | 1. PT Kertas Leces                                |
|     |  | 2. PT Kertas Kraft Aceh                           |
|     |  | 3. PT Pradnya Paramita                            |
|     |  | 4. PT Balai Pustaka                               |



Lampiran I : 2/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

| No. | BUMN INFRA STRUKTUR  | BUMN NON INFRA STRUKTUR                          |
|-----|--|--|
|     |  | <b>Bidang Industri Strategis</b>                 |
|     |  | 1. PT Dirgantara Indonesia                       |
|     |  | 2. PT DAHANA                                     |
|     |  | 3. PT Barata Indonesia                           |
|     |  | 4. PT Boma Bisma Indra                           |
|     |  | 5. PT Krakatau Steel                             |
|     |  | 6. PT Industri Kereta Api                        |
|     |  | 7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia          |
|     |  | 8. PT Len Industri                               |
| II. | SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA<br>KONSTRUKSI DAN KONSULTAN<br>KONSTRUKSI |  |
|     |  | <b>Bidang Kawasan Industri</b>                   |
|     |  | 1. PT Kawasan Benkat Nusantara                   |
|     |  | 2. PT Kawasan Industri Makasar                   |
|     |  | 3. PT kawasan Industri Medan                     |
|     |  | 4. PT Kawasan Industri Wijaya                    |
|     |  | 5. PT PDI Batam                                  |
|     |  | <b>Bidang Konstruksi Bangunan</b>                |
|     |  | 1. PT Nindya Karya                               |
|     |  | 2. PT Wijaya Karya                               |
|     |  | 3. PT Waskita Karya                              |
|     |  | 4. PT Adhi Karya                                 |
|     |  | 5. PT Brantas Abipraya                           |
|     |  | 6. PT Hutama Karya                               |
|     |  | 7. PT Istaka Karya                               |
|     |  | 8. PT Pembangunan Perumahan                      |
|     |  | <b>Bidang Konsultan Konstruksi</b>               |
|     |  | 1. PT Bina Karya                                 |
|     |  | 2. PT Indah Karya                                |
|     |  | 3. PT Indra Karya                                |
|     |  | 4. PT Virama Karya                               |
|     |  | 5. PT Yodya Karya                                |
|     |  | <b>Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol</b> |
|     |  | 1. PT Amarta Karya                               |
|     |  | 2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari                |
|     |  | 3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya                |
|     |  | 4. PT Industri Kapal Indonesia                   |
|     |  | 5. PT Jasa Marga                                 |



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran I : 3/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

| No.  | BUMN INFRA STRUKTUR  | BUMN NON INFRA STRUKTUR                    |
|------|--|--|
| III. | <b>SEKTOR PERHUBUNGAN,<br/>TELEKOMUNIKASI DAN<br/>PARIWISATA</b> |  |
|      | <b>Bidang Prasarana Perhubungan Laut</b>                         |  |
|      | 1. PT Pelabuhan Indonesia I                                      |  |
|      | 2. PT Pelabuhan Indonesia II                                     |  |
|      | 3. PT Pelabuhan Indonesia III                                    |  |
|      | 4. PT Pelabuhan Indonesia IV                                     |  |
|      | 5. PT Rukindo  |  |
|      | 6. PT Varuna Tirta Prakasya                                      |  |
|      | <b>Bidang Prasarana Perhubungan Udara</b>                        |  |
|      | 1. PT Angkasa Pura I   |  |
|      | 2. PT Angkasa Pura II  |  |
|      | <b>Bidang Sarana Perhubungan</b>                                 |  |
|      | 1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd                                   | 1. PT Pelayaran Nasional Indonesia         |
|      | 2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan                   | 2. PT Garuda Indonesia                     |
|      | 3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna                                  | 3. PT Merpati Airlines                     |
|      | 4. PT Kereta Api Indonesia                                       |  |
|      |  | <b>Bidang Pos</b>                          |
|      |  | 1. PT Pos Indonesia                        |
|      |  | <b>Bidang Pariwisata</b>                   |
|      |  | 1. PT Hotel Indonesia dan Natour           |
|      |  | 2. PT Pengembangan Pariwisata Bali         |
|      |  | 3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko |
|      |  | <b>Bidang Penyiaran</b>                    |
|      |  | 1. PT Televisi Republik Indonesia          |
| IV.  | <b>SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN<br/>KEHUTANAN PERDAGANGAN</b>    |  |
|      |  | <b>Bidang Perkebunan</b>                   |
|      |  | 1. PT Perkebunan Nusantara I               |
|      |  | 2. PT Perkebunan Nusantara II              |
|      |  | 3. PT Perkebunan Nusantara III             |
|      |  | 4. PT Perkebunan Nusantara IV              |
|      |  | 5. PT Perkebunan Nusantara V               |
|      |  | 6. PT Perkebunan Nusantara VI              |
|      |  | 7. PT Perkebunan Nusantara VII             |
|      |  | 8. PT Perkebunan Nusantara VIII            |
|      |  | 9. PT Perkebunan Nusantara IX              |



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I : 4/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

| NO.       | BUMN INFRA STRUKTUR                        | BUMN NON INFRA STRUKTUR            |
|-----------|--|------------------------------------|
|           |  | 10. PT Perkebunan Nusantara X      |
|           |  | 11. PT Perkebunan Nusantara XI     |
|           |  | 12. PT Perkebunan Nusantara XII    |
|           |  | 13. PT Perkebunan Nusantara XIII   |
|           |  | 14. PT Perkebunan Nusantara XIV    |
|           |  | <b>Bidang Perikanan</b>            |
|           |  | 1. PT Usaha Mina                   |
|           |  | 2. PT Perikanan Samodra Besar      |
|           |  | 3. PT Tirta Raya Mina              |
|           |  | 4. PT Perikani                     |
|           |  | <b>Bidang Pertanian</b>            |
|           |  | 1. PT Pertani                      |
|           |  | 2. PT Sang Hyang Seri              |
|           |  | <b>Bidang Kehutanan</b>            |
|           |  | 1. PT Inhutani I                   |
|           |  | 2. PT Inhutani II                  |
|           |  | 3. PT inhutani III                 |
|           |  | 4. PT Inhutani IV                  |
|           |  | 5. PT Perhutani                    |
| <b>V.</b> | <b>SEKTOR PELAYANAN UMUM</b>               |                                    |
|           | 1. Perum Perumnas                          |                                    |
|           | 2. Perum Jasa Tirta I                      |                                    |
|           | 3. Perum Jasa Tirta II                     |                                    |
|           | 4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar |                                    |
|           | 5. Perum PPD                               |                                    |
|           | 6. Perum Damri                             |                                    |
|           |  | 1. Perum Percetakan Negara RI      |
|           |  | 2. Perum Sarana Pengembangan Usaha |
|           |  | 3. Perum Peruri                    |
|           |  | 4. Perum Pegadaian                 |
|           |  | 5. Perum PFN                       |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 1/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**SALINAN**

**TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BUMN NON JASA KEUANGAN**

**I. ASPEK KEUANGAN**

1. Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
  - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.  
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

*Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan*

| Indikator                                    | Bobot     |           |
|--|-----------|-----------|
|  | Infra     | Non Infra |
| 1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)       | 15        | 20        |
| 2. Imbalan Investasi (ROI)                   | 10        | 15        |
| 3. Rasio Kas                                 | 3         | 5         |
| 4. Rasio Lancar                              | 4         | 5         |
| 5. Colection Periods                         | 4         | 5         |
| 6. Perputaran persediaan                     | 4         | 5         |
| 7. Perputaran total asset                    | 4         | 5         |
| 8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva | 6         | 10        |
| <b>Total Bobot</b>                           | <b>50</b> | <b>70</b> |

3. Metode Penilaian
  - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 2/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

*Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE*

| ROE (%)         | Skor  |           |
|-----------------|-------|-----------|
|                 | Infra | Non Infra |
| 15 < ROE        | 15    | 20        |
| 13 < ROE ≤ 15   | 13,5  | 18        |
| 11 < ROE ≤ 13   | 12    | 16        |
| 9 < ROE ≤ 11    | 10,5  | 14        |
| 7,9 < ROE ≤ 9   | 9     | 12        |
| 6,6 < ROE ≤ 7,9 | 7,5   | 10        |
| 5,3 < ROE ≤ 6,6 | 6     | 8,5       |
| 4 < ROE ≤ 5,3   | 5     | 7         |
| 2,5 < ROE ≤ 4   | 4     | 5,5       |
| 1 < ROE ≤ 2,5   | 3     | 4         |
| 0 < ROE ≤ 1     | 1,5   | 2         |
| ROE < 0         | 1     | 0         |

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

**b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)**

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - Aktiva Tetap
  - Aktiva lain-lain
  - Aktiva Non Produktif
  - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.





**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 3/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI**

| ROI (%)         | Skor  |           |
|-----------------|-------|-----------|
|                 | Infra | Non Infra |
| 18 < ROI        | 10    | 15        |
| 15 < ROI ≤ 18   | 9     | 13,5      |
| 13 < ROI ≤ 15   | 8     | 12        |
| 12 < ROI ≤ 13   | 7     | 10,5      |
| 10,5 < ROI ≤ 12 | 6     | 9         |
| 9 < ROI ≤ 10,5  | 5     | 7,5       |
| 7 < ROI ≤ 9     | 4     | 6         |
| 5 < ROI ≤ 7     | 3,5   | 5         |
| 3 < ROI ≤ 5     | 3     | 4         |
| 1 < ROI ≤ 3     | 2,5   | 3         |
| 0 < ROI ≤ 1     | 2     | 2         |
| ROI < 0         | 0     | 1         |

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

**c. Rasio Kas/Cash Ratio**

**Rumus:**

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

**Definisi :**

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

**Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio**

| Cash Ratio = x (%) | Skor  |           |
|--------------------|-------|-----------|
|                    | Infra | Non Infra |
| x ≥ 35             | 3     | 5         |
| 25 ≤ x < 35        | 2,5   | 4         |
| 15 ≤ x < 25        | 2     | 3         |
| 10 ≤ x < 15        | 1,5   | 2         |
| 5 ≤ x < 10         | 1     | 1         |
| 0 ≤ x < 5          | 0     | 0         |

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 4/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} : \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

*Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio*

| Current Ratio = x (%) | Skor  |           |
|-----------------------|-------|-----------|
|                       | Infra | Non Infra |
| 125 <= x              | 3     | 5         |
| 110 <= x < 125        | 2,5   | 4         |
| 100 <= x < 110        | 2     | 3         |
| 95 <= x < 100         | 1,5   | 2         |
| 90 <= x < 95          | 1     | 1         |
| x < 90                | 0     | 0         |

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

*Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods*

| CP = x<br>(hari) | Perbaikan = x<br>(hari) | Skor  |           |
|------------------|-------------------------|-------|-----------|
|                  |                         | Infra | Non Infra |
| x <= 60          | x > 35                  | 4     | 5         |
| 60 < x <= 90     | 30 < x <= 35            | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x <= 120    | 25 < x <= 30            | 3     | 4         |
| 120 < x <= 150   | 20 < x <= 25            | 2,5   | 3,5       |
| 150 < x <= 180   | 15 < x <= 20            | 2     | 3         |
| 180 < x <= 210   | 10 < x <= 15            | 1,6   | 2,4       |
| 210 < x <= 240   | 6 < x <= 10             | 1,2   | 1,8       |
| 240 < x <= 270   | 3 < x <= 6              | 0,8   | 1,2       |
| 270 < x <= 300   | 1 < x <= 3              | 0,4   | 0,6       |
| 300 < x          | 0 < x <= 1              | 0     | 0         |

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 5/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

*Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan*

| PP = x<br>(hari) | Perbaikan<br>(hari) | Skor  |           |
|------------------|---------------------|-------|-----------|
|                  |                     | Infra | Non Infra |
| x ≤ 60           | 35 < x              | 4     | 5         |
| 60 < x ≤ 90      | 30 < x ≤ 35         | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x ≤ 120     | 25 < x ≤ 30         | 3     | 4         |
| 120 < x ≤ 150    | 20 < x ≤ 25         | 2,5   | 3,5       |
| 150 < x ≤ 180    | 15 < x ≤ 20         | 2     | 3         |
| 180 < x ≤ 210    | 10 < x ≤ 15         | 1,6   | 2,4       |
| 210 < x ≤ 240    | 6 < x ≤ 10          | 1,2   | 1,8       |
| 240 < x ≤ 270    | 3 < x ≤ 6           | 0,8   | 1,2       |
| 270 < x ≤ 300    | 1 < x ≤ 3           | 0,4   | 0,6       |
| 300 < x          | 0 < x ≤ 1           | 0     | 0         |

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 6/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**Contoh Perhitungan :**

**Contoh 1 :**

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

**Contoh 2 :**

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

**g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)**

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

**Definisi :**

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

**Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset**

| TATO = x<br>(%) | Perbaikan = x<br>(%) | Skor  |           |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|
|                 |                      | Infra | Non Infra |
| 120 < x         | 20 < x               | 4     | 5         |
| 105 < x <= 120  | 15 < x <= 20         | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x <= 105   | 10 < x <= 15         | 3     | 4         |
| 75 < x <= 90    | 5 < x <= 10          | 2,5   | 3,5       |
| 60 < x <= 75    | 0 < x <= 5           | 2     | 3         |
| 40 < x <= 60    | x <= 0               | 1,5   | 2,5       |
| 20 < x <= 40    | x < 0                | 1     | 2         |
| x <= 20         | x < 0                | 0,5   | 1,5       |

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

**Contoh perhitungan :**

**Contoh 1 :**

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 7/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

**h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)**

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

*Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset*

| TMS thd TA (%) = x |                | Skor  |           |
|--------------------|----------------|-------|-----------|
|                    |                | Infra | Non Infra |
|                    | $x < 0$        | 0     | 0         |
| 0                  | $\leq x < 10$  | 2     | 4         |
| 10                 | $\leq x < 20$  | 3     | 6         |
| 20                 | $\leq x < 30$  | 4     | 7,25      |
| 30                 | $\leq x < 40$  | 6     | 10        |
| 40                 | $\leq x < 50$  | 5,5   | 9         |
| 50                 | $\leq x < 60$  | 5     | 8,5       |
| 60                 | $\leq x < 70$  | 4,5   | 8         |
| 70                 | $\leq x < 80$  | 4,25  | 7,5       |
| 80                 | $\leq x < 90$  | 4     | 7         |
| 90                 | $\leq x < 100$ | 3,5   | 6,5       |

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 8/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

## II. ASPEK OPERASIONAL

### 1. Total Bobot

|                         |    |
|-------------------------|----|
| -BUMN INFRASTRUKTUR     | 35 |
| -BUMN NON INFRASTRUKTUR | 15 |

### 2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"

### 3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

### 4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor =  $100\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$
- Baik (B) : skor =  $80\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$
- Cukup (C) : skor =  $50\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$
- Kurang (K) : skor =  $20\% \times \text{Bobot indikator yang bersangkutan}$

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 9/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**5. Mekanisme Penilaian**

**a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot**

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

**b. Mekanisme penetapan nilai**

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 10/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

6. Contoh Perhitungan

**BUMN Pelabuhan (infrastruktur)**

| Indikator yang digunakan                   | Bobot     | Nilai | Skor      | Unsur-unsur yang dipertimbangkan                     |
|--|-----------|-------|-----------|--|
| 1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat. | 15        | B     | 12        | Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.       |
| 2. Peningkatan kualitas SDM                | 10        | C     | 5         | Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb. |
| 3. Research & Development                  | 10        | D     | 8         | Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.              |
| <b>Total</b>                               | <b>25</b> |       | <b>35</b> |  |

**III. ASPEK ADMINISTRASI**

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

*Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.*

| Indikator                      | Bobot     |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
|                                | Infra     | Non Infra |
| 1. Laporan Perhitungan Tahunan | 3         | 3         |
| 2. Rancangan RKAP              | 3         | 3         |
| 3. Laporan Periodik            | 3         | 3         |
| 4. Kinerja PUKK                | 6         | 6         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>15</b> | <b>15</b> |

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 11/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- Penentuan nilai

*Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit*

| Jangka Waktu Laporan Audit Diterima  | Skor |
|--|------|
| - sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup | 3    |
| - sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup  | 2    |
| - lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup     | 0    |

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

*Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP*

| Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan | Skor |
|---|------|
| - 2 bulan atau lebih cepat  | 3    |
| - kurang dari 2 bulan   | 0    |

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 12/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.  
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

*Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik*

| Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun  | Skor |
|-------------------------------------|------|
| lebih kecil atau sama dengan 0 hari | 3    |
| $0 < x \leq 30$ hari                | 2    |
| $0 < x \leq 60$ hari                | 1    |
| $< 60$ hari                         | 0    |

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

| Triwulanan | Berakhir Periode | Tanggal diterima |
|------------|------------------|------------------|
| I          | 31/3 199x        | 5/5 199x         |
| II         | 30/5 199x        | 15/7 199x        |
| III        | 30/9 199x        | 31/10 199x.      |
| IV         | 31/12 199x       | 10/2 199x+1      |

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 13/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

| Indikator                                       | Bobot    |           |
|---|----------|-----------|
|   | Infra    | Non Infra |
| 1. Efektivitas penyaluran                       | 3        | 3         |
| 2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman | 3        | 3         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6</b> | <b>6</b>  |

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

Rumus : 
$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
  - Saldo awal
  - Pengembalian pinjaman
  - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
  - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

**Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK**

| Penyerapan (%) | > 90 | 85 s.d. 90 | 80 s.d. 85 | <80 |
|----------------|------|------------|------------|-----|
| Skor           | 3    | 2          | 1          | 0   |

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

|   |           |
|---|-----------|
| - Saldo awal tahun 1999                                     | Rp. 500   |
| - Pengembalian pinjaman                                     | Rp. 5.000 |
| - Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan | Rp. 4.000 |
| - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK                       | Rp. 500   |

**Jumlah** **Rp.10.000**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 14/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana =  $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus : 
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
  - Lancar 100 %
  - Kurang lancar 75 %
  - Ragu-ragu 25 %
  - Macet 0 %
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

*Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.*

| Tingkat pengembalian (%) | > 70 | 40 s.d. 70 | 10 s.d. 40 | <10 |
|--------------------------|------|------------|------------|-----|
| Skor                     | 3    | 2          | 1          | 0   |

**Contoh Perhitungan:**

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| - Lancar        | = | 1.500        |
| - Kurang lancar | = | 500          |
| - Ragu-ragu     | = | 900          |
| - Macet         | = | 100          |
| <b>Jumlah</b>   |   | <b>3.000</b> |



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 15/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

|                 |       |   |       |   |       |
|-----------------|-------|---|-------|---|-------|
| - Lancar        | 1.500 | x | 100 % | = | 1.500 |
| - Kurang lancar | 500   | x | 75 %  | = | 375   |
| - Ragu-ragu     | 800   | x | 25 %  | = | 225   |
| - Macet         | 100   | x | 0 %   | = | 0     |

**Jumlah rata-rata tertimbang** **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah  $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

3000

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

#### IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
  - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
  - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 16/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL**

| INDIKATOR                                 | UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN   | CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | BUMN/<br>SEKTOR   | UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN   |
| (1)                                       | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1. Pelayanan kepada Pelanggan/ Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaikan kualitas sarana &amp; prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan.</li> <li>✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service)</li> <li>✓ Perbaikan mutu produk.</li> <li>✓ Pengembangan jalur distribusi.</li> <li>✓ Pelayanan gangguan/troubles.</li> <li>✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan.</li> <li>✓ Kecepatan pelayanan.</li> <li>✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan.</li> <li>✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa.</li> </ul> | Pelabuhan<br><br>Pengairan (PERUM Otonita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)<br><br>PLN<br><br>Jalan Tol<br><br>Garuda/MNA Bandara                         | Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb<br><br>Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.<br>Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.<br><br>Kualitas jalan, indikator traffic sign.<br>On time performance.<br>Kebersihan terminal Bandara. |
| 2. Efisiensi produksi dan produktivitas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle.</li> <li>✓ Peningkatan rendemen.</li> <li>✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi.</li> <li>✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya.</li> <li>✓ Peningkatan nilai men-hour.</li> <li>✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi).</li> </ul>   | Perkebunan<br><br>Kereta Api/pelayaran /penerbangan<br><br>PLN<br>Pengairan (PERUM Otonita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)<br>Konsultan<br>Pertambangan | Rendemen, produksi per hektar, dsb.<br><br>Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.<br>Susut teknis, susut distribusi, dsb.<br>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P)<br>Men-hour terjual, dsb.<br>Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.  |



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 17/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   |
|--|--|--|---|
| 3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.</li> <li>✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.</li> <li>✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum.</li> <li>✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.</li> <li>✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.</li> </ul> | <p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p> | <p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas demmaga, pengerukan alur /kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p> |
| 4. Inovasi produk baru                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.</li> <li>✓ Penciptaan produk-produk baru</li> <li>✓ Peningkatan penguasaan teknologi.</li> </ul>  | <p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>          | <p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>  |
| 5. Peningkatan kualitas SDM                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mutu diklat.</li> <li>✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)</li> </ul>   | Berlaku umum untuk semua sektor                        | <p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Kadensasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan</p> <p>Kepedulian manajemen terhadap R &amp; D.</p>   |
| 6. Research & Development (R & D).         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan metode baru yang prospektif.</li> <li>✓ Hasil riset yang bermanfaat.</li> <li>✓ Perhatian perusahaan terhadap R &amp; D.</li> </ul>  | Berlaku umum untuk semua sektor                        | Kepedulian manajemen terhadap R & D.  |
| 7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pencapaian sasaran.</li> <li>✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.</li> <li>✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan.</li> </ul>   | Berlaku umum untuk semua sektor                        | Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.   |



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 18/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

| (1)                                | (2)  | (3)  | (4)   |
|------------------------------------|--|--|---|
| 8. Kepedulian terhadap lingkungan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kebersihan lingkungan.</li> <li>✓ Pelaksanaan AMDAL.</li> <li>✓ Reklamasi.</li> <li>✓ Estate regulation.</li> </ul> | Berlaku umum untuk<br>semua sektor<br>Kehutanan<br>Pertambangan<br>Industri manufaktur<br>Kawasan Industri | Kebersihan lingkungan kerja.<br>Reboisasi, AMDAL.<br>Reklamasi daerah eks<br>tambang, AMDAL.<br>AMDAL.<br>Estate regulation, AMDAL. |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

**ttd**

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**t t d**

**LAKSAMANA SUKARDI**